



2026 RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH**

KABUPATEN BANJAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat tersusun.

Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dokumen Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKPAD Kabupaten Banjar.

Kami menyadari bahwa Dokumen Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2025. Semoga dokumen Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2026 ini dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Martapura, 25 Agustus 2025

Kepala Badan,

Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660104 198602 1 004

DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2024	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	32
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	38
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD SKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III	49
TUJUAN DAN SASARAN	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPAD	51
3.3. Program dan Kegiatan	53
BAB IV	61
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	61
BAB V	68
PENUTUP	68

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar s/d Tahun 2023 Kabupaten Banjar
27

Tabel 2. 2 Realisasi Indikator Sasaran BPKPAD Tahun 2023 **32**

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
33

Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar **34**

Tabel 2.5 Isu Strategis **35**

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 Kabupaten Banjar **39**

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPAD 2023 **52**

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar **57**

Tabel 4.1 Rumusan Program Prioritas SKPD Tahun 2023 sesuai Prioritas RKPD **62**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

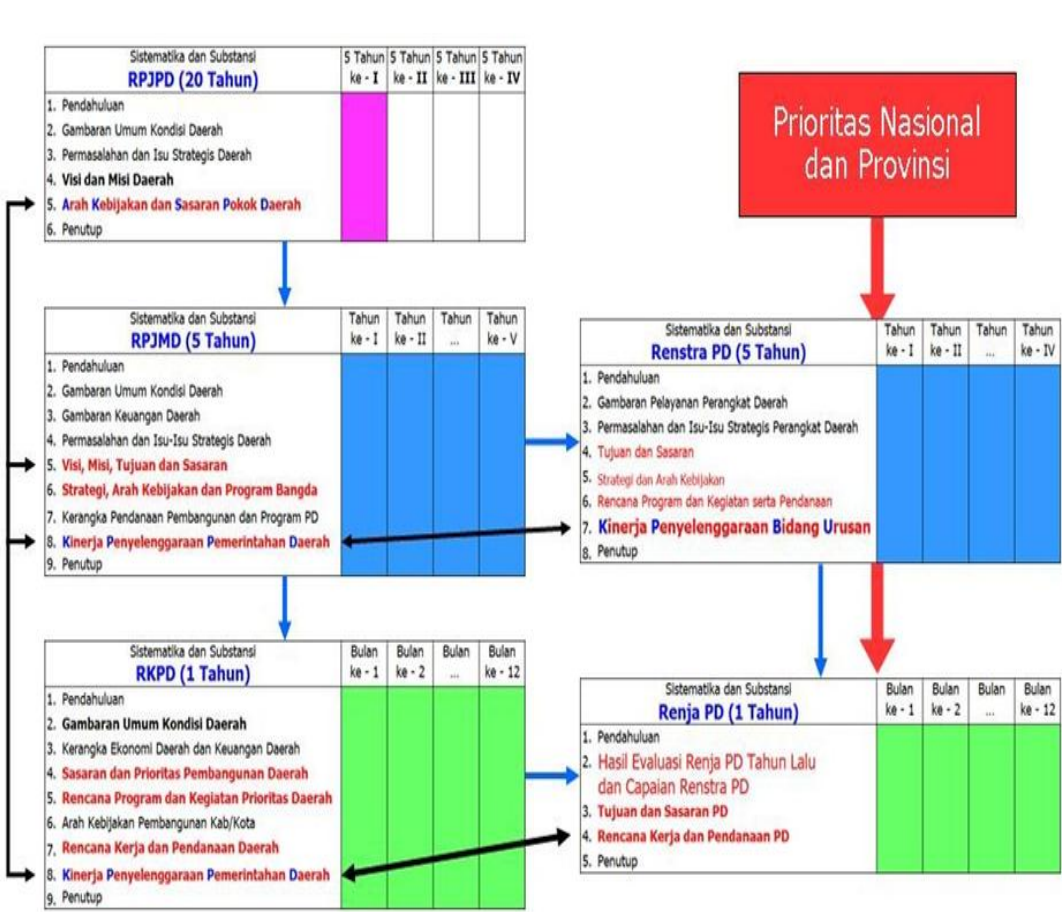
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat 2).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Renja PD memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

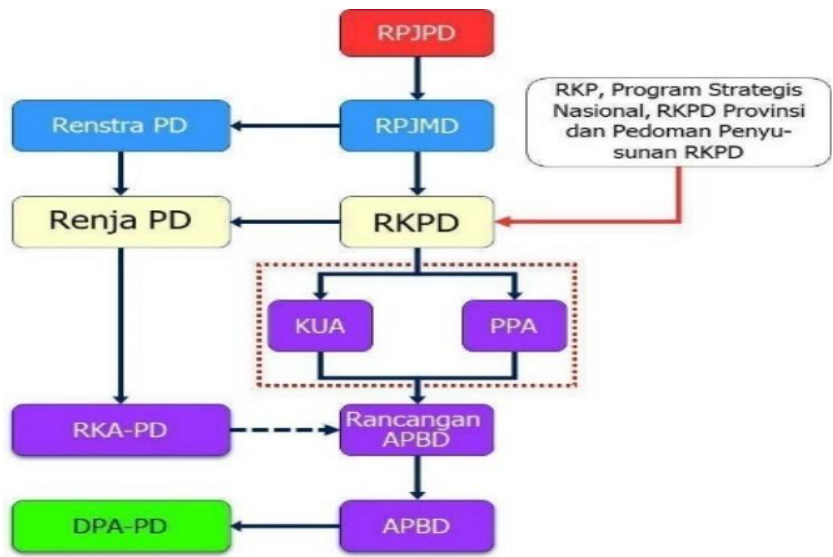


Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RPKD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RPKD.

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Penyusunan Renja Bappedalitbang saat ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana kerja dari periode Renstra Bappedalitbang tahun 2021 -2026.

Mengingat pentingnya arti dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berikutnya.
2. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
3. Penyusunan renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 18) tanggal 9 Juli 2025
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja.

❖ Tujuan

- a) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BPKPAD tahun 2025;
- b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
- c) Sebagai instrumen akuntabilitas di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari dokumen Renja BPKPAD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
	2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
1	Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
3	Perangkat Daerah
2.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
4	
2.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
5	
BAB III.	Tujuan dan Sasaran BPKPAD
3.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
1	
3.	Tujuan dan sasaran Renja BPKPAD
2	
3.	Program dan Kegiatan
3	
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan BPKPAD
BAB V.	Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11).telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025 – 2029 adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU. MANDIRI. DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN Keadilan

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Maju : kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat.

Mandiri : kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Agamis : kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai- nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat. menguatnya kohesi sosial antar masyarakat. dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar

Gotong Royong : kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak. dan gotong royong merupakan nilai

luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan : kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

1. Misi

Dalam pelaksanaannya, kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
- b. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
- c. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban ikut mendukung pada misi ke empat yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan

melayani. dalam hal ini berperan sebagai unsur pelayanan Publik pada pembayaran pajak dan penatausahaan keuangan.

1) **Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD**

Pada tahun 2026 BPKPAD Kabupaten Banjar mendapatkan pagu murni belanja langsung sebesar Rp. 307.669.842.667. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 4 program, 15 kegiatan dan 87 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) **Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- . Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah

- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Adapun realisasi kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

- a)** Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKPAD Kabupaten Banjar yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKPAD Kabupaten Banjar yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- b)** Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKPAD Kabupaten Banjar yang **telah memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

No	RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5	1	%	3,59	359	Kepala Badan
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5	1	%	0,89	89	Kepala Badan
2	Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	WTP	100	Predikat	50	62,5	Kepala Badan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	50	Predikat	50	100	Kepala Badan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	60	%	88,3	147,17	Kepala Badan
4.	Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD	Persentase penerapan Perda APBD	100	25	%	25	100	Kepala Bidang Anggaran
	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100	50	%	50	100	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100	25	%	25	100	Kepala Bidang Perbendaharaan
5.	Penyusunan Penganggaran daerah Sesuai jadwal	Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah Sesuai Jadwal	100	25	%	25	100	Kepala Bidang Anggaran
	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	25	%	25	100	Kepala Bidang Anggaran
6.	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	0	Dokumen	-	-	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
7.	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2	0	Dokumen	-	-	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
8.	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	2	Dokumen	2	100	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
9.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	1	Dokumen	1	100	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
10.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	0	Dokumen	-	-	Kasubbid Penyusunan Anggaran
11.	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	0	Dokumen	-	-	Kasubbid Penyusunan Anggaran

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
12.	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3	0	Dokumen	-	-	Plt. Kasubbid Analisis Kebijakan Anggaran
13.	Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	50	%	50	100	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
14.	Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
15.	Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Dan Pembiayaan
16.	Tersedianya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Dan Pembiayaan
17.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan
18.	Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah
19.	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah
20.	Tersalurnya Belanja Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah
21.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah yang berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
22.	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengendalian

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penang gung Jawab
								Anggaran
23.	Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai
24.	Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai
25.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Aset	88,88	0	%	0	0	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
26.	Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan pada Kabupaten	Persentase Realisasi Penerimaan atas pemanfaatan BMD	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan BMD
27.	Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan BMD
28.	Tersedianya rencana kebutuhan BMD (RKBMD) Tepat Waktu	Persentase waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD)	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan BMD
29.	Tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	Persentase Pengguna barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
30.	Terealisasinya Tindakan lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	Persentase Tindakan lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	70	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
31.	Terealisasinya Tindak Lanjut BMD Rusak Berat	persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat	70	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
32.	Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase bidang tanah yang besertifikat	70	0	%	-	-	Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
33.	Terealisasinya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	70	0	%	-	-	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penang gung Jawab
34.	Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD	100	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
35.	Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Jumlah Data dan Informasi rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	100	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
36.	Terpenuhinya tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	85	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
37.	Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD bagi Perangkat Daerah	Laporan BMD Semester I dan II Perangkat Daerah tepat waktu	100	50	%	50	100	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
38.	Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	100	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
39.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah	4	1	Dokumen	1	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
40.	Terlaksananya Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah	4	1	Laporan	1	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
41.	Terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah	Persentase Wajib Pajak yang di periksa	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Penagihan Pemeriksaan Dan Keberatan
42.	Meningkatnya Kepatuhan, Pengawasan Wajib Pajak	Persentase Peningkatan dari hasil pelaporan Kepatuhan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Pajak	100	25	%	25	100	
43.	Meningkatnya wajib pajak Yang dilaksanakan uji petik	Persentase Wajib Pajak yang dilaksanakan pengawasan dan uji petik	100	25	%	25	100	
44.	Meningkatnya Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Penagihan Pemeriksaan Dan Keberatan
45.	Terselesaikannya keberatan pajak daerah	Persentase keberatan pajak daerah yang terselesaikan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Penagihan Pemeriksaan Dan Keberatan
46.	Tersedianya data pelaporan retribusi daerah	Jumlah pelaporan data retribusi daerah	4	1	Dokumen	1	1	Plt. Kepala Sub

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
								Bidang Pengelol aan Data Dan Informas i
47.	Tersedianya laporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait	Jumlah pelaporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait	16	4	Dokum en	4	4	Plt. Kepala Sub Bidang Pengelol aan Data Dan Informas i
48.	Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti	100	100	%	100	100	Kepala Sub Bidang Pelayan an Pendap atan
49.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah yang terlayani	100	100	%	100	100	
50.	Meningkatnya Akses Pembayaran Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital	11	11	Layana n	100	100	
51.	Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Membayar	Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar	100	100	%	100	100	
52.	Meningkatnya Potensi wajib Pajak Daerah Yang Terdata	Persentase Potensi Wajib Pajak Daerah (7 jenis) Yang Terdata	100	100	%	100	100	Kepala Sub Bidang Pendata an, Pendaft aran Dan Validasi Objek Pendap atan
53.	Terpeliharanya Basis Dat a Pajak Daerah	Persentase Basis Data Pajak Daerah Yang Terupdate	100	100	%	100	100	
54.	Meningkatnya updating basis Data pajak daerah	Persentase Updating data Pajak Daerah	100	100	%	100	100	
55.	Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah	Persentase Peningkatan k etetapan wajib pajak daera h	100	100	%	100	100	Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penetap an Objek Pendap atan
56.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80	-	%	-	-	Sekretar is
57.	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	50	%	57	114	Kepala Sub Bagian Perenca naan
58.	Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100	-	%	-	-	Kepala Sub Bagian Perenca naan
59.	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	62	%	61	98,38	Kepala Sub Bagian Keuang an
60.	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	50	%	50	100	Kepala Sub Bagian Keuang an
61.	Tersusunnya Laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
70.	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
71.	Lancarnya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
72.	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg Kepala Sub Bagian Umpeg
73.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
74.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKPAD 2023

Penjelasan Tabel:

- 1. A. Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan III sebesar 1 % dan realisasi sebesar 3,59 % dengan capaian 359%.
A. Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retibusi Daerah Terhadap PAD dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 % dan realisasi sebesar 0,89 % dengan capaian 89%.
- 2. Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel dengan Indikator Opini BPK dengan target pada Triwulan III sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.
- 3. A. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan III sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50%.
B. Sasaraan Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada Triwulan III sebesar 60 % dan realisasi sebesar 88,3%.

4. A. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD dengan Indikator Persentase penerapan Perda APBD dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25%.
B. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu dengan Indikator Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP dengan target pada Triwulan III sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.
C. Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan dengan Indikator Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25% dengan capaian 100%.
5. A. Sasaran Kinerja Penyusunan Penganggaran daerah Sesuai jadwal dengan Indikator Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah Sesuai Jadwal dengan target pada Triwulan III sebesar 25% dan realisasi sebesar 25% dengan capaian 100%.
B. Sasaran Kinerja Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25% dengan capaian 100%.
6. Sasaran Kinerja Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS dengan Indikator Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target pada Triwulan II sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
7. Sasaran Kinerja Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS dengan Indikator Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target pada Triwulan III sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
8. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan Indikator Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi dengan target pada Triwulan III sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen dengan capaian 100%.
9. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan target pada Triwulan III sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen dengan capaian 100%.

10. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target pada Triwulan III sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen dengan capaian 100%.
11. Sasaran Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target pada Triwulan III sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan IIII.
12. Sasaran Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan Indikator Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan target pada Triwulan III sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan IIII.
13. Sasaran Kinerja Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Indikator Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target pada Triwulan II sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50 % dengan capaian 100%.
14. Sasaran Kinerja Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dengan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
15. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan dengan Indikator Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
16. Sasaran Kinerja Tersedianya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan dengan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

18. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga dengan Indikator Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
19. Sasaran Kinerja Tercapainya Penyerapan APBD dengan Indikator Persentase Penyerapan APBD dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
20. Sasaran Kinerja Tersalurnya Belanja Daerah dengan Indikator Persentase Penyaluran Belanja Daerah dengan target pada Triwulan III sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan baik dengan indikator Persentase laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah yang berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
22. Sasaran Kinerja Tercapainya Penyerapan APBD dengan indikator Persentase Penyerapan APBD dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
23. Sasaran Kinerja Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai dengan indikator Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
24. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga dengan indikator Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berkualitas dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dengan capaian 0% dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan IV.
26. Sasaran Kinerja Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan pada Kabupaten dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan atas pemanfaatan BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

27. Sasaran Kinerja Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan dengan indikator Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
28. Sasaran Kinerja Tersedianya rencana kebutuhan BMD (RKBMD) Tepat Waktu dengan indikator Persentase waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD) dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
29. Sasaran Kinerja Tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian dengan indikator Persentase Pengguna barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
30. Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD dengan indikator Persentase Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
31. Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak Lanjut BMD Rusak Berat dengan indikator persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III dan Triwulan IV.
32. Sasaran Kinerja Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD dengan indikator Persentase bidang tanah yang besertifikat dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
33. Sasaran Kinerja Terealisasinya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan indikator persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
34. Sasaran Kinerja Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD dengan indikator Persentase Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

35. Sasaran Kinerja Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dengan indikator Jumlah Data dan Informasi rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
36. Sasaran Kinerja Terpenuhinya tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD dengan indikator Persentase tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
37. Sasaran Kinerja Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD bagi Perangkat Daerah dengan indikator Laporan BMD Semester I dan II Perangkat Daerah tepat waktu dengan target pada Triwulan II sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50 % dengan capaian 100%.
38. Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan indikator Nilai tindak lanjut BMD Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
39. Sasaran Kinerja Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 % dan realisasi sebesar 0,89 % dengan capaian 89 %.
40. Sasaran Kinerja Meningkatnya realisasi dengan indikator Persentase Realisasi pajak daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 40 % dan realisasi sebesar 50,66 % dengan capaian 126,65 %.
41. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi dengan indikator Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi dengan target pada Triwulan II sebesar 40 % dan realisasi sebesar 50,66 % dengan capaian 126,65 %.
42. Sasaran Kinerja Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil Pelaporan Perangkat Daerah terkait dengan target pada Triwulan II sebesar 40 % dan realisasi sebesar 46,25 % dengan capaian 115,62 %.

43. Sasaran Kinerja sasaran kinerja Terlaksananya Penyusunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen dengan capaian 100%.
44. Sasaran Kinerja Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 6 Laporan dengan capaian 150%.
45. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan dengan capaian 100%.
46. Sasaran Kinerja terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah dengan indikator Persentase Wajib Pajak yang di periksa dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
47. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan, Pengawasan Wajib Pajak dengan indikator Persentase Peningkatan dari hasil pelaporan Kepatuhan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Pajak dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
48. Sasaran Kinerja Meningkatnya wajib pajak Yang dilaksanakan uji petik dengan indikator Persentase Wajib Pajak yang dilaksanakan pengawasan dan uji petik dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
49. Sasaran Kinerja Meningkatnya pengawasan retribusi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait dengan target pada Triwulan II sebesar 40 % dan realisasi sebesar 46,25 % dengan capaian 115,63%.
50. Sasaran Kinerja Meningkatnya Realisasi dengan indikator Persentase Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

51. Sasaran Kinerja Terelesailkannya keberatan pajak daerah dengan indikator Persentase keberatan pajak daerah yang terelesaikan dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
52. Sasaran Kinerja Tersedianya data pelaporan retribusi daerah dengan indikator Jumlah pelaporan data retribusi daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen dengan capaian 100%.
53. Sasaran Kinerja Tersedianya laporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait dengan indikator Jumlah pelaporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait dengan target pada Triwulan II sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen dengan capaian 100%.
54. Meningkatnya Pajak Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 % dan realisasi sebesar 1,95 % dengan capaian 195%.
55. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan indikator Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti dengan target pada Triwulan II sebesar 100% dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.
56. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan indikator Persentase Pajak Daerah yang terlayani dengan target pada Triwulan II sebesar 100% dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.
57. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akses Pembayaran Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital dengan target pada Triwulan II sebesar 11 Layanan dan realisasi sebesar 11 Layanan dengan capaian 100%.
58. Sasaran Kinerja Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Membayar dengan indikator Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar dengan target pada Triwulan II sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.
59. Sasaran Kinerja Meningkatnya Potensi wajib Pajak Daerah Yang Terdata dengan indikator Persentase Potensi Wajib Pajak Daerah (7 jenis) Yang Terdata dengan target pada Triwulan II sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.

60. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Basis Data Pajak Daerah dengan indikator Persentase Basis Data Yang Terupdate dengan target pada Triwulan II sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.
61. Sasaran Kinerja Meningkatnya updating basis Data pajak daerah dengan indikator Persentase Updating data Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
62. Sasaran Kinerja Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah dengan indikator Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.
63. Sasaran Kinerja Terlaksananya Penilaian PBB P2 dengan indikator Jumlah Objek Pajak yang dinilai dengan target pada Triwulan II sebesar 3800 Wajib Pajak dan realisasi sebesar 3827 Wajib Pajak dengan capaian 101%.
64. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III dan Triwulan IV.
65. Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 50 % dan realisasi sebesar 57 % dengan capaian 114%.
66. Sasaran Kinerja Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP dengan indikator Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III dan Triwulan IV.
67. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 62 % dan realisasi sebesar 61 % dengan capaian 98,38%.
68. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50 % dengan capaian 100%

69. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
70. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
71. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
72. Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
73. Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.
74. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Untuk mencapai target sasaran strategis dan sasaran kinerja banyak dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bisa disajikan sebagai berikut persasaran strategis/kinerja.

1. A. Dalam Mencapai target Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:
Faktor Pendukung:
 - Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
 - Dukungan dari pimpinan Daerah Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta koordinasi yang baik dengan Inspektorat serta seluruh Perangkat Daerah.

- Regulasi baik Perda maupun Perbup sebagai dasar pelaksanaan sudah selesai
 - Dukungan untuk pelaksanaan sampai dengan ketersediaan Aplikasi dapat disediakan
- Faktor Penghambat:

- Kesadaran Wajib pajak akan pentingnya dampak pajak dan retribusi
- Mengingat Luas daerah sebagai cakupan wajib pajak dan retribusi perlu updating Wajib Pajak
- Adanya Diskon Pembayaran Listrik
- Adanya MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tidak Kena Pajak BPHTB
- Salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan adalah Hotel Aston yang mengalami peralihan kepemilikan sehingga kontribusi pajaknya juga terhambat.

B. Dalam mencapai target Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Adanya pembayaran retribusi IMTA (Tenaga Kerja Asing) sudah mencapai target
- Regulasi baik Perda maupun Perbup sebagai dasar pelaksanaan sudah selesai
- Dukungan untuk pelaksanaan sampai dengan ketersediaan Aplikasi dapat disediakan.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi.
- Terlambatnya perangkat daerah melaporkan realisasi retribusi
- Terkadang terjadi tumpang tindih kebijakan atau kurangnya sinkronisasi antar unit kerja

2. Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel dengan Indikator Opini BPK terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- Dukungan dari pimpinan Daerah Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta koordinasi yang baik dengan Inspektorat serta seluruh Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat:

- Laporan Keuangan atau hasil audit dari BUMD yang diserahkan tidak serempak

3. A. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
- B. Sasaraan Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
5. Penyusunan Penganggaran Daerah Sesuai Jadwal.
- B. Sasaran Kinerja Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan:
- Faktor Pendukung:
- Data keuangan, rencana kerja, dan informasi program tersedia dengan lengkap dan tepat waktu;
 - Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
 - Sinergi antar perangkat daerah, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan DPRD berjalan dengan baik;
 - Komitmen dari kepala daerah dan pimpinan OPD dalam mendorong penyelesaian penganggaran tepat waktu.
- Faktor Penghambat:
- OPD tidak menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sesuai tenggat waktu yang ditentukan;
 - Adanya perubahan kebijakan pusat atau daerah yang mendadak menyebabkan revisi dan keterlambatan;
 - Gangguan teknis atau kendala dalam penggunaan sistem penganggaran (misalnya SIPD error)
6. Sasaran Kinerja Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS dengan Indikator Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target pada Triwulan II sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
7. Sasaran Kinerja Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS dengan Indikator Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target pada Triwulan II sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

8. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan Indikator Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Data perencanaan dan anggaran dari setiap SKPD tersedia secara lengkap dan tepat waktu;
- Penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran (seperti SIPD) yang mendukung proses koordinasi dan verifikasi;
- Terselenggaranya rapat koordinasi antar SKPD secara rutin dan responsive.

Faktor Penghambat:

- Banyak SKPD tidak tepat waktu dalam menyerahkan dokumen RKA-nya;
- Perubahan regulasi (misalnya Permendagri) tidak segera dipahami oleh seluruh SKPD;
- Tidak semua SKPD proaktif berkoordinasi dengan tim perencanaan anggaran

9. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Adanya dukungan dari kepala daerah dan pimpinan OPD mendorong kelancaran koordinasi.
- Kerjasama lintas sektor dalam menyamakan persepsi dan prioritas pembangunan mendukung efektivitas koordinasi.

Faktor Penghambat:

- Dokumen pendukung seperti RKPD, Renja OPD, dan lainnya yang terlambat disusun/dikirim akan menghambat finalisasi dokumen koordinasi.
- Pergantian atau pembaruan kebijakan dan regulasi tanpa waktu sosialisasi yang cukup dapat menghambat proses penyesuaian
- Perbedaan atau ketidaksesuaian data antar OPD menghambat sinkronisasi rencana dan anggaran

10. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

11. Sasaran Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
12. Sasaran Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan Indikator Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan target pada Triwulan II sebesar 0 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
13. Sasaran Kinerja Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Indikator Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
14. Sasaran Kinerja Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dengan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.
15. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan dengan Indikator Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:
Faktor Pendukung:
 - Adanya pendampingan dari pegawai yang lebih senior atau ahli di bidang keuangan mempercepat transfer pengetahuan;
 - Sistem/aplikasi keuangan yang user-friendly membantu pemahaman terhadap proses penyusunan laporan keuangan;
 - Adanya komitmen dan perhatian pimpinan terhadap peningkatan kompetensi pegawai mendorong semangat belajar.Faktor Penghambat:
 - Jika tidak ada pelatihan berkala, penyusun laporan keuangan kesulitan mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan baru.
 - Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai bisa menjadi kendala dalam memahami materi teknis akuntansi/keuangan;
 - Perubahan kebijakan pusat yang sering dan cepat menyulitkan sinkronisasi di level daerah/instansi

16. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Tersedianya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan dengan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Dukungan teknologi informasi seperti SIPD yang berfungsi optimal;
- Sinergi antara unit akuntansi dan unit pelaksana kegiatan berjalan dengan baik;
- Dokumen transaksi (SPM, bukti pembayaran, kontrak, dll.) lengkap dan mudah diakses.

Faktor Penghambat:

- Dokumen pendukung dari unit terkait lambat diserahkan atau tidak lengkap;
- Minimnya komunikasi antara unit pelaksana kegiatan dan unit akuntansi;
- Pergantian regulasi yang mendadak dapat menyebabkan keterlambatan adaptasi;
- Kendala teknis pada sistem pelaporan atau server lambat/down.

17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 0 %.

18. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga dengan Indikator Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Adanya sistem monitoring dan pelaporan keuangan yang akurat dan real-time memudahkan pemantauan penyetoran oleh pihak ketiga;
- Adanya pegawai yang profesional dan terlatih dalam mengelola administrasi dan pengawasan terhadap penyetoran;
- Prosedur penyetoran yang mudah dan tidak berbelit-belit mendorong kepatuhan.

Faktor Penghambat:

- Gangguan atau ketidakakuratan sistem informasi dapat menghambat proses pelaporan dan penyetoran;
- Pihak ketiga tidak memahami kewajiban atau prosedur penyetoran karena kurangnya sosialisasi

19. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Tercapainya Penyerapan APBD dengan Indikator Persentase Penyerapan APBD terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan kebutuhan riil.
- Dokumen DPA, kontrak, dan dokumen pengadaan tersedia sejak awal tahun anggaran;
- Adanya kebijakan percepatan penyerapan anggaran oleh pemerintah pusat/daerah.

Faktor Penghambat:

- APBD disahkan terlambat, menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.
- Masalah teknis, administrasi, atau hukum dalam proses tender
- Rendahnya komunikasi antara bagian keuangan, program, dan teknis.

20. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Terselurnya Belanja Daerah dengan Indikator Persentase Penyaluran Belanja Daerah terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:.

Faktor Pendukung:

- Dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS, APBD) disusun dan ditetapkan tepat waktu serta sesuai kebutuhan prioritas;
- Transfer dari pusat (DAU, DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) tersedia dan dicairkan sesuai jadwal;
- Kepala daerah dan pimpinan OPD mendukung percepatan realisasi anggaran.

Faktor Penghambat:

- Keterlambatan Penetapan APBD
- Hambatan pada proses tender atau e-purchasing bisa menghambat realisasi belanja modal dan barang/jasa.

21. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan baik dengan indikator Persentase laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah yang berkualitas terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Adanya tenaga keuangan yang kompeten dan terlatih dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- penggunaan aplikasi keuangan seperti SIPD atau lainnya yang mempermudah pencatatan dan pelaporan secara real time;
- Komitmen pimpinan OPD dalam menjaga kualitas laporan dan koordinasi lintas bidang.

Faktor Penghambat:

- Keterlambatan dalam pengumpulan data dari unit kerja menyebabkan laporan tidak tepat waktu.
- Rendahnya sinergi antara bagian keuangan dan unit pelaksana kegiatan

22. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Tercapainya Penyerapan APBD dengan indikator Persentase Penyerapan APBD terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Program dan kegiatan sudah dirancang secara realistis dan sesuai prioritas Pembangunan;
- DPA, RKA, dan dokumen pendukung lainnya disusun dan disahkan sesuai jadwal;
- Adanya pengawasan dari inspektorat, Bappeda, dan pimpinan daerah yang mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat:

- Target kegiatan tidak realistis, kurang matang, atau tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran.
- Kekurangan tenaga teknis atau staf yang paham regulasi keuangan dan pengadaan;
- Perubahan aturan, revisi anggaran, atau persyaratan administrasi yang kompleks dan memakan waktu

23. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai dengan indikator Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Adanya aplikasi keuangan SIPD atau sejenisnya yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik;
- Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang membantu dalam mendeteksi kendala lebih awal dan mempercepat penyelesaian masalah.

Faktor Penghambat:

- Unit kerja tidak tepat waktu dalam menyerahkan dokumen pendukung seperti SK, daftar hadir, dan lain-lain.
- Terjadi gangguan teknis pada aplikasi keuangan yang digunakan untuk penatausahaan belanja pegawai
- Terbatasnya jumlah pegawai yang menangani penatausahaan menyebabkan keterlambatan

24. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga dengan indikator Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut.

Faktor Pendukung:

- Adanya sistem monitoring dan pelaporan keuangan yang akurat dan real-time memudahkan pemantauan penyetoran oleh pihak ketiga;
- Adanya pegawai yang profesional dan terlatih dalam mengelola administrasi dan pengawasan terhadap penyetoran;
- Prosedur penyetoran yang mudah dan tidak berbelit-belit mendorong kepatuhan.

Faktor Penghambat:

- Gangguan atau ketidakakuratan sistem informasi dapat menghambat proses pelaporan dan penyetoran;
- Pihak ketiga tidak memahami kewajiban atau prosedur penyetoran karena kurangnya sosialisasi.

25. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berkualitas dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut.

Faktor Pendukung:

- Pemanfaatan aplikasi pengelolaan aset (seperti SIMDA BMD) yang terhubung antar OPD untuk akurasi dan efisiensi pengelolaan;
- Adanya pegawai yang profesional dan terlatih dalam mengelola administrasi dan pengawasan terhadap penyetoran;
- Sinergi yang baik antara OPD pemilik aset dengan BPKAD sebagai pengelola aset daerah.

Faktor Penghambat:

- Masih banyak aset yang belum tercatat atau tercatat ganda, tidak sesuai kondisi fisik, atau belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap;
- Minimnya komunikasi dan keterlibatan OPD dalam pelaporan serta pengelolaan aset;
- Aset bermasalah secara hukum, seperti dalam sengketa atau tidak memiliki sertifikat, dapat menghambat optimalisasi pengelolaan

26. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan pada Kabupaten dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan atas pemanfaatan BMD terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut.

Faktor Pendukung:

- Adanya peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur pemanfaatan BMD secara komprehensif (sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dsb);
- Inventarisasi BMD yang lengkap dan mutakhir memudahkan perencanaan serta optimalisasi pemanfaatan aset;

- Terjalinnnya kerja sama strategis dengan pihak swasta atau BUMD dalam bentuk sewa atau kerja sama pemanfaatan;
- Sinergi yang baik antara OPD pemilik aset dengan BPKAD sebagai pengelola aset daerah.

Faktor Penghambat:

- Banyak aset daerah yang idle (tidak digunakan) karena belum dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai strategis;
- Masih terdapat data BMD yang tidak akurat, belum tercatat dengan baik, atau belum dilakukan penilaian nilai sewanya;
- Lokasi atau kondisi fisik BMD tidak menarik untuk disewa atau dimanfaatkan oleh pihak swasta;
- Kurangnya petugas yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan penilaian aset daerah.

27. Sasaran Kinerja Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan dengan indikator Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Dukungan dan komitmen dari pimpinan dan OPD terkait dalam menyusun regulasi BMD;
- Sistem informasi yang mendukung inventarisasi dan pengelolaan BMD secara digital;
- Kolaborasi antara BPKAD, bagian hukum, dan perangkat daerah lainnya yang terkait pengelolaan BMD;

Faktor Penghambat:

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang belum tersosialisasikan atau belum diadopsi oleh daerah;
- Data BMD yang tidak lengkap atau tidak mutakhir menyulitkan penyusunan regulasi yang tepat sasaran;
- Penyusunan dokumen regulasi BMD tidak menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja OPD.

28. Sasaran Kinerja Tersedianya rencana kebutuhan BMD (RKBMD) Tepat Waktu dengan indikator Persentase waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD) dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Aparatur pengelola barang yang memahami regulasi, aplikasi, dan proses RKBMD;

- Komunikasi yang lancar antara unit perencanaan, pengelola BMD, dan keuangan mendukung keselarasan data
- Dukungan dan arahan pimpinan mempercepat proses penyusunan dan penetapan.

Faktor Penghambat:

- OPD tidak menyampaikan usulan tepat waktu atau tidak sesuai format standar
- Komunikasi yang lemah antara pengelola barang dan perencana di OPD

29. Sasaran Kinerja Tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian dengan indikator Persentase Pengguna barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya aplikasi atau sistem pelaporan online yang memudahkan pengguna barang dalam menyampaikan laporan tepat waktu;
- Komitmen pimpinan dalam mendorong staf untuk taat terhadap ketentuan pelaporan;

Faktor Penghambat:

- Beberapa pengguna barang belum memahami kewajiban dan prosedur pelaporan pengawasan dan pengendalian;
- Kendala jaringan internet, sistem pelaporan yang error, atau format pelaporan yang membingungkan;
- Minimnya perhatian dari pihak pengguna barang terhadap pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan;
- Komunikasi dan koordinasi antara unit pengguna barang dan pengelola pelaporan belum optimal

30. Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD dengan indikator Persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Memudahkan identifikasi dan analisis BMD yang layak untuk ditindaklanjuti.
- Dukungan dari kepala daerah dan manajemen puncak mempercepat proses persetujuan dan implementasi;
- Adanya aplikasi atau sistem digital yang mendukung pemrosesan data dan dokumentasi BMD secara efisien.

Faktor Penghambat:

- Data BMD yang Tidak Lengkap atau Tidak Akurat sehingga Menghambat proses identifikasi dan pengambilan keputusan terhadap aset.
- Prosedur yang memerlukan persetujuan banyak pihak sering memperlambat tindak lanjut;
- Misalnya biaya untuk appraisal, pemusnahan fisik, atau pengangkutan aset.

31. Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak Lanjut BMD Rusak Berat dengan indikator persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Kerja sama antara unit pengelola barang, pengguna barang, dan tim teknis mempermudah eksekusi tindak lanjut;
- Adanya arahan dan perhatian pimpinan terhadap penyelesaian BMD rusak berat mempercepat proses tindak lanjut;
- Data BMD rusak berat yang terdokumentasi dengan baik memudahkan proses identifikasi dan tindak lanjut;

Faktor Penghambat:

- Data BMD yang tidak diperbarui menyulitkan proses verifikasi dan penetapan status barang rusak berat.
- Proses birokrasi seperti penghapusan aset atau pengalihan tanggung jawab sering memakan waktu lama;
- Unit kerja pengguna tidak melaporkan kondisi BMD rusak berat secara tepat waktu.

32. Sasaran Kinerja Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD dengan indikator Persentase bidang tanah yang besertifikat dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Adanya data bidang tanah BMD yang telah terinventarisasi dengan baik memudahkan proses pengajuan sertifikat;
- Sinergi antara Pemerintah Daerah, BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan OPD teknis mempercepat proses administrasi dan verifikasi;
- Adanya program nasional percepatan sertifikasi tanah atau instruksi langsung dari kepala daerah mendorong capaian target;
- Tersedianya anggaran untuk biaya pengukuran, pendaftaran, dan pengelolaan sertifikat sangat membantu percepatan target.

Faktor Penghambat:

- Banyak bidang tanah BMD yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah atau bukti fisik yang jelas;

- Konflik kepemilikan, sengketa, atau tumpang tindih dengan pihak lain menjadi kendala serius dalam proses sertifikasi;
- Minimnya komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data dan proses sertifikasi;
- Proses administrasi di BPN dan pemerintah daerah yang berbelit-belit membuat waktu penyelesaian menjadi lama.

33. Sasaran Kinerja Terealisasinya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan indikator persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Dokumen seperti sertifikat hak milik, girik, atau akta jual beli tersedia dan valid.
- Kerja sama yang baik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan instansi pengelola asset;
- Adanya sistem informasi manajemen aset atau tanah yang memudahkan pendataan dan validasi dokumen.

Faktor Penghambat:

- Banyak tanah yang belum bersertifikat atau hanya memiliki bukti kepemilikan informal.
- Kurangnya Koordinasi antar Instansi;
- Biaya untuk pengurusan dokumen atau pengukuran tanah tidak mencukupi

34. Sasaran Kinerja Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD dengan indikator Persentase Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Adanya SOP pengelolaan BMD yang jelas dan diterapkan secara konsisten;
- Penggunaan aplikasi SIMDA BMD atau aplikasi sejenis yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah;
- Pemutakhiran data BMD secara berkala.

Faktor Penghambat:

- Banyak aset belum tercatat, tidak ada bukti kepemilikan, atau tidak sesuai kondisi fisik;
- Tidak dilakukan inventarisasi secara berkala atau hasilnya tidak ditindaklanjuti
- Kurangnya sinergi antara OPD pengguna barang dan pengelola barang

35. Sasaran Kinerja Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dengan indikator Jumlah Data dan Informasi rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Sistem informasi manajemen aset yang memadai dan terintegrasi (misalnya SIMDA BMD);
- Adanya arahan dan pengawasan dari pimpinan serta koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dalam pengelolaan BMD;
- Peran Inspektorat daerah dalam melakukan audit internal dan pendampingan pelaporan keuangan/BMD;
- Data BMD tercatat lengkap dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Faktor Penghambat:

- Masih ditemukan perbedaan antara data BMD yang ada di sistem, laporan keuangan, dan kondisi fisik di lapangan;
- OPD tidak responsif terhadap permintaan data, klarifikasi, atau tindak lanjut temuan BPK;
- Temuan berulang karena rekomendasi sebelumnya tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh.

36. Sasaran Kinerja Terpenuhinya tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD dengan indikator Persentase tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Dukungan dan arahan dari pimpinan daerah serta keterlibatan aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemilik BMD sangat membantu percepatan tindak lanjut rekomendasi;
- Adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat, BPKAD, dan OPD pengelola BMD mempermudah penelusuran, verifikasi, dan tindak lanjut temuan;
- Data yang tertib dan terdokumentasi lengkap mempercepat proses klarifikasi dan tindak lanjut atas temuan BPK.

Faktor Penghambat:

- Beberapa OPD tidak menindaklanjuti temuan karena kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap pentingnya rekomendasi BPK
- BMD belum dicatat atau dilaporkan secara tertib sesuai ketentuan akuntansi dan pengelolaan barang.

37. Sasaran Kinerja Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD bagi Perangkat Daerah dengan indikator Laporan BMD Semester I dan II Perangkat Daerah tepat waktu dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Petugas penatausahaan barang memiliki pemahaman yang baik terhadap
- regulasi dan aplikasi SIMBADA atau sistem sejenis;
- Adanya sistem pencatatan BMD yang terintegrasi dengan keuangan dan aset,
- mempermudah penyusunan laporan secara cepat dan akurat;
- Dukungan dan dorongan dari kepala perangkat daerah mempercepat proses pelaporan;
- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengelola barang, operator, dan bendahara barang mendukung kelancaran pelaporan.

Faktor Penghambat:

- Data aset belum lengkap, tidak update, atau dokumen pendukung tidak tersedia tepat waktu;
- Gangguan jaringan, error pada aplikasi SIMDA BMD atau E-BMD atau keterbatasan akses pengguna;

38. Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan indikator Nilai tindak lanjut BMD Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Ketersediaan anggaran untuk penyelesaian fisik dan administrasi KDP;
- Penggunaan aplikasi SIMDA BMD atau SIPKD yang terintegrasi;
- Arahan dan pengawasan pimpinan daerah terhadap penyelesaian aset KDP.

Faktor Penghambat:

- Ketidaksesuaian antara data fisik dengan dokumen konstruksi;
- Pengusulan status aset yang lambat oleh OPD pengguna;
- Proyek mangkrak atau gagal selesai, sehingga tidak bisa diakui sebagai aset tetap;

39. Sasaran Kinerja Meningkatnya realisasi dengan indikator Persentase Realisasi pajak daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 % dan realisasi sebesar 31 % dengan capaian 3.100 %.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Pengelolaan basis data wajib pajak yang akurat dan mutakhir;
- Alokasi anggaran memadai untuk kegiatan peningkatan pajak;
- Sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif;
- Komitmen pimpinan daerah dalam mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak;
- Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- Sarana dan prasarana masih belum optimal.

40. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sudah mengatur dengan rinci tentang mekanisme retribusi dan pembinaannya;
- Dukungan aktif dari kepala daerah serta pimpinan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan pembinaan secara rutin;
- Rapat koordinasi rutin antar perangkat daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan pembinaan dan pelaporannya;
- Evaluasi rutin terhadap laporan yang masuk dan umpan balik dari instansi pembina untuk perbaikan.

Faktor Penghambat:

- Beberapa perangkat daerah belum memahami cara penyusunan laporan pembinaan retribusi yang sesuai standar;
- Ketidaktertiban dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu dan lengkap;

41. Sasaran Kinerja terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah dengan indikator Persentase Wajib Pajak yang di periksa dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya petugas pemeriksa pajak yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemeriksaan pajak daerah;
- Tersedianya sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan memudahkan pengumpulan serta analisis data;
- Adanya peraturan daerah dan kebijakan pimpinan yang mendorong optimalisasi pemeriksaan pajak;
- Sinergi yang baik antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi lain seperti Dinas Perizinan, Dinas Kependudukan, atau BPKAD.

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan personel yang berwenang atau mampu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh wajib pajak potensial;
- Wajib pajak yang tidak kooperatif, tidak transparan, atau menyembunyikan data sebenarnya;
- Tidak mencukupinya anggaran untuk operasional pemeriksaan seperti transportasi, alat pendukung, atau aplikasi.

42. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan, Pengawasan Wajib Pajak dengan indikator Persentase Peningkatan dari hasil pelaporan Kepatuhan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Pajak dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Petugas pajak yang memiliki keahlian teknis dan kemampuan komunikasi yang baik dalam pembinaan dan pengawasan;
- Penyuluhan pajak kepada pelaku usaha dan masyarakat umum secara rutin;
- Sinergi antar unit kerja dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;

Faktor Penghambat:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan;
- Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan;
- Adanya gangguan teknis atau ketidaksinkronan data antar sistem.

43. Sasaran Kinerja Meningkatnya wajib pajak Yang dilaksanakan uji petik dengan indikator Persentase Wajib Pajak yang dilaksanakan pengawasan dan uji petik dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan Data Wajib Pajak yang Akurat dan Terintegrasi;

- Dukungan Regulasi dan Kebijakan;
- Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Faktor Penghambat:

- Masih banyak objek pajak yang belum terdata atau data yang tidak mencerminkan kondisi terkini.
- Akses ke lokasi yang sulit, keterbatasan sarana transportasi atau cuaca ekstrem yang menghambat kegiatan uji petik
- Ketidaksinergian dalam berbagi data atau pelaksanaan kegiatan pengawasan gabungan

44. Sasaran Kinerja Meningkatnya Realisasi dengan indikator Persentase Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya Digitalisasi Layanan Pajak Daerah;
- Adanya Sosialisasi dan Edukasi;
- Dukungan pimpinan daerah dalam bentuk pengawasan dan target yang terukur;

Faktor Penghambat:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak;
- Terbatasnya anggaran operasional untuk sosialisasi, pemutakhiran data, dan penagihan lapangan;
- Sistem online yang kadang error, down.

45. Sasaran Kinerja terselesaikannya keberatan pajak daerah dengan indikator Persentase keberatan pajak daerah yang terselesaikan dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya sistem digitalisasi dokumen dan pelacakan proses keberatan yang efisien mempercepat penyelesaian;
- Kerja sama antar bidang membantu verifikasi dan analisis keberatan lebih cepat;
- Wajib pajak yang kooperatif dan menyampaikan keberatan dengan data yang lengkap sangat membantu mempercepat penyelesaian.

Faktor Penghambat:

- Keberatan yang disampaikan tanpa bukti memadai memperlambat proses analisis dan pengambilan Keputusan;
- Adanya perubahan peraturan yang belum tersosialisasi dapat membingungkan petugas maupun wajib pajak.

46. Sasaran Kinerja Tersedianya data pelaporan retribusi daerah dengan indikator Jumlah pelaporan data retribusi daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- Adanya aplikasi atau sistem digital untuk pencatatan dan pelaporan retribusi memudahkan proses input dan pengumpulan data.

Faktor Penghambat:

- Beberapa OPD tidak menyampaikan laporan secara berkala atau tidak sesuai format yang ditentukan
- Permasalahan pada pencatatan awal retribusi, misalnya duplikasi atau kekeliruan klasifikasi

47. Sasaran Kinerja Tersedianya laporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait dengan indikator Jumlah pelaporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait dengan target pada Triwulan II sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Sistem digital atau aplikasi pelaporan retribusi daerah yang terintegrasi antar perangkat daerah mempermudah dan mempercepat pelaporan.

Faktor Penghambat:

- Beberapa perangkat daerah belum melaporkan secara berkala atau tidak lengkap karena lemahnya pengawasan atau prioritas kerja.

48. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan indikator Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti dengan target pada Triwulan II sebesar 100% dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Tingkat kepatuhan dan kemauan wajib pajak untuk berkonsultasi mempengaruhi volume dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Faktor Penghambat:

- Gangguan pada sistem layanan pajak atau tidak terintegrasinya sistem berdampak pada keterlambatan atau kegagalan tindak lanjut;

Ketika wajib pajak tidak menindaklanjuti atau menanggapi layanan yang diberikan, proses menjadi tidak efektif;

49. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan indikator Persentase Pajak Daerah yang terlayani dengan target pada Triwulan II sebesar 100% dan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Sistem informasi pajak yang terintegrasi dan mudah diakses oleh wajib pajak;
- Program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait kewajiban dan layanan pajak daerah.

Faktor Penghambat:

- Sistem Informasi yang belum Optimal.
- Kurangnya pengetahuan atau kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak daerah

50. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akses Pembayaran Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital dengan target pada Triwulan II sebesar 11 Layanan dan realisasi sebesar 11 Layanan dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Dukungan Regulasi dan Kebijakan;
- Kemajuan Teknologi Informasi;
- Adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah dari pimpinan.

Faktor Penghambat:

- Wilayah dengan jaringan internet terbatas atau tidak stabil yang menghambat akses digital;
- Kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data dan transaksi digital dapat menurunkan tingkat penggunaan;
- Sistem informasi pajak daerah yang belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital, sehingga menyulitkan sinkronisasi data

51. Sasaran Kinerja Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Membayar dengan indikator Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Penyuluhan rutin dan terstruktur kepada masyarakat tentang kewajiban pajak daerah dan manfaatnya;

- Pemberian potongan pajak, hadiah, atau piagam penghargaan bagi wajib pajak yang taat;
- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, dinas pajak, dan aparat penegak hukum dalam pengumpulan dan verifikasi data pajak.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah;
- Daerah terpencil masih mengalami kendala akses terhadap sistem pembayaran digital

52. Sasaran Kinerja Meningkatnya Potensi wajib Pajak Daerah Yang Terdata dengan indikator Persentase Potensi Wajib Pajak Daerah (7 jenis) Yang Terdata dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang jelas terkait pendataan wajib pajak dan jenis pajak daerah;
- Sinergi antara perangkat daerah (Bapenda, Dinas Perizinan, Satpol PP) dalam mendukung penertiban dan pendataan;
- Ketersediaan aplikasi atau sistem informasi perpajakan daerah.
- Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usaha dan menyampaikan data usaha dengan benar

Faktor Penghambat:

- Jumlah petugas yang terbatas atau kurangnya kendaraan operasional untuk menjangkau lokasi wajib pajak di wilayah yang luas.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah

53. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Basis Data Pajak Daerah dengan indikator Persentase Basis Data Yang Terupdate dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi;
- Kerja sama yang baik dengan instansi lain seperti Dinas Kependudukan, BPN, atau kelurahan untuk sinkronisasi data objek dan subjek pajak.

Faktor Penghambat:

- Minimnya anggaran untuk pembaruan sistem, pelatihan SDM, atau kegiatan verifikasi lapangan;
- Data pajak yang tidak akurat, tumpang tindih, atau belum terhubung antar sistem
- Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan perubahan data atau enggan diverifikasi.

54. Sasaran Kinerja Meningkatnya updating basis Data pajak daerah dengan indikator Persentase Updating data Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi.
- Tersedianya dana untuk operasional updating data seperti survei lapangan, pembelian perangkat, pelatihan;
- Wajib pajak yang sadar akan kewajiban administrasi dan memiliki akses yang mudah untuk memperbarui data mereka

Faktor Penghambat:

- Ketidapahaman masyarakat terhadap pentingnya data pajak yang akurat.
- Objek pajak di daerah terpencil atau sulit diakses menghambat survei lapangan
- Proses validasi data manual atau berjenjang menimbulkan keterlambatan dalam pembaruan informasi pajak

55. Sasaran Kinerja Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah dengan indikator Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya database wajib pajak yang valid dan selalu diperbarui (misalnya data pemilik usaha, bangunan, kendaraan;
- Adanya aplikasi atau sistem informasi pajak daerah yang mempermudah penetapan, penghitungan, dan pelaporan pajak;
- Penyuluhan atau edukasi rutin yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak;
- Adanya Kerjasama yang baik antar instansi.

Faktor Penghambat:

- Banyak data tidak ter-update, tidak lengkap, atau tidak sinkron antar instansi;
- Wajib pajak yang enggan melapor atau menyembunyikan objek pajak yang sebenarnya;
- Sistem/aplikasi pajak yang belum optimal atau belum terintegrasi dengan sistem lain.

56. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III dan Triwulan IIII.

Faktor Pendukung:

- Adanya Komitmen Pimpinan dan Pegawai;
- Adanya Sistem dan Prosedur yang Jelas;
- Pelatihan dan Pengembangan SDM;
- Dukungan Pengawasan Internal.

Faktor Penghambat:

- Keterlambatan dalam penyesuaian SOP dan kebijakan internal dengan regulasi baru;
- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas;

57. Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya Ketersediaan SDM yang Kompeten;
- Adanya Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif.

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan jumlah staf atau kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
- Gangguan sistem informasi atau jaringan yang menyebabkan hambatan teknis dalam input dan pelaporan dokumen;

58. Sasaran Kinerja Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP dengan indikator Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada Triwulan III dan Triwulan IIII.

Faktor Pendukung:

- Dukungan dan arahan dari pimpinan mendorong pelaksanaan SPIP secara sistematis dan tepat waktu;
- Adanya pedoman teknis, SOP, dan peraturan yang jelas memudahkan penyusunan dokumen SPIP sesuai ketentuan;
- Tim kerja yang solid serta komunikasi lintas unit kerja yang baik mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemahaman tentang SPIP dapat mengakibatkan dokumen tidak sesuai ketentuan;
- Ketidakterlibatan semua pihak terkait menyebabkan ketidakterpaduan dokumen;
- Perubahan yang tidak diantisipasi dapat menyebabkan dokumen menjadi tidak relevan atau perlu disusun ulang.

59. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 36 % dan realisasi sebesar 31 % dengan capaian 86%.

Faktor Pendukung:

- Dorongan dan dukungan aktif dari kepala OPD untuk menyusun laporan secara tepat waktu dan sesuai standar;
- Hubungan kerja yang baik antar bagian keuangan dan perencanaan untuk kelengkapan data.

Faktor Penghambat:

- Gangguan pada aplikasi keuangan atau kurang stabilnya sistem informasi;

60. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan dengan target pada Triwulan II sebesar 8 % dan realisasi sebesar 8 % dengan capaian 100%

Faktor Pendukung:

- Sistem informasi yang terintegrasi dan andal (misalnya SIMDA BMD) sangat membantu dalam pencatatan dan pelaporan aset secara akurat dan tepat waktu;
- Tingginya komitmen terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang mengatur pengelolaan aset;
- Peran aktif pimpinan perangkat daerah serta sinergi antara bidang aset, keuangan, dan perencanaan mendukung kelancaran pelaporan.

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya jumlah atau kurangnya kompetensi personel yang mengelola aset bisa menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam laporan;
- Kurangnya komunikasi antara pengelola aset dan unit kerja pemilik aset menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data.

61. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya Sistem dan Aplikasi yang Mendukung;
- Adanya Komitmen Pimpinan;
- Sinergi antar bagian/subbagian di perangkat daerah dalam menyediakan data dan laporan.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemahaman pegawai tentang indikator kualitas laporan pelayanan public;
- Ketidakterersediaan Data yang Valid dan Tepat Waktu;
- Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik dan pelaporan

62. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Adanya pegawai yang memiliki pemahaman baik tentang regulasi kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian;
- Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan mudah diakses;
- Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian;

Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan kepegawaian atau kurangnya semangat untuk melakukan tugas secara tertib dan tepat waktu.
- Komunikasi yang tidak efektif antara bagian kepegawaian dengan unit kerja lainnya
- Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan beban kerja administrasi kepegawaian.

63. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Adanya staf administrasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan administrasi;
- Adanya komitmen kepala perangkat daerah untuk mendorong efisiensi dan kualitas administrasi.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya tanggung jawab terhadap penyusunan, pencatatan, atau pelaporan administrasi yang benar dan tepat waktu;
- Masih digunakannya proses manual atau sistem informasi yang tidak saling terhubung;
- Keterbatasan jumlah atau kemampuan teknis pegawai dalam mengelola dan mengawasi jasa penunjang.

64. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Dukungan anggaran operasional dan belanja jasa yang cukup memungkinkan pengadaan barang/jasa penunjang secara tepat waktu dan berkualitas.
- Komitmen pimpinan dalam memastikan pelayanan umum berjalan lancar dengan dukungan jasa penunjang yang optimal.

Faktor Penghambat:

- Tidak adanya evaluasi berkala terhadap kualitas jasa penunjang menyebabkan masalah tidak terdeteksi lebih awal.

65. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup;
- Dukungan aplikasi e-procurement atau sistem informasi barang milik daerah mempercepat proses dokumentasi dan pelaporan.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya SDM atau Kemampuan Teknis.
- Pergantian aturan dapat mengganggu kelancaran pelaporan jika belum ada penyesuaian operasional
- Jika tidak ada evaluasi berkala, maka kesalahan atau keterlambatan dalam pengadaan dan pelaporan tidak cepat terdeteksi dan diperbaiki

66. Dalam mencapai target Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Adanya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang akurat dan tepat sasaran;
- Koordinasi lintas bidang/perangkat daerah yang solid

Faktor Penghambat:

- Tidak adanya atau lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi kondisi sarana prasarana;
- Banyaknya aset yang sudah tua dan sulit dipelihara;
- Data aset yang tidak akurat atau tidak terbaru

c) Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKPAD Kabupaten Banjar yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

No	RENCANA KERJA 2026 BPKPAD Strategis/Sasaran Kinerja	KAB. BANJAR Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9	10
39.	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5	1	%	95	9500	Kepala Penge ndalian Dan Penge mbang an Penda patan Daerah
40.	Meningkatnya realisasi pajak daerah	Persentase Realisasi pajak daerah	5	40	%	50,66	126,65	Kepala Penge ndalian Dan Penge mbang an Penda patan Daerah
41.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi	100	40	%	50,66	126,65	Kepala Penge ndalian Dan Penge mbang an Penda patan Daerah
42.	Meningkatnya pembinaan retribusi daerah	Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil Pelaporan Perangkat Daerah terkait	100	40	%	46,25	115,62	Kepala Penge ndalian Dan Penge mbang an Penda patan Daerah
44.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah	17	4	Lapora n	6	100	Kepala Sub Bidang Perenc anaan dan Penge mbang an
49.	Meningkatnya pengawasan retribusi daerah	Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait	100	40	%	46,25	115	
54.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5	1	%	3,59	359	Kepala Bidang Pengel olaan Penda patan Daerah
63.	Terlaksananya Penilaian PBB P2	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	8300	3800	WP	3827	101	Kepala Sub Bidang Penilai an Dan Peneta pan Objek Penda patan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Sasaran Kinerja Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 % dan realisasi sebesar 95 % dengan capaian 9.500 %.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Ketersediaan anggaran untuk penyelesaian fisik dan administrasi KDP;
- Penggunaan aplikasi SIMDA BMD atau SIPKD yang terintegrasi;
- Arahan dan pengawasan pimpinan daerah terhadap penyelesaian aset KDP.

Faktor Penghambat:

- Ketidaksesuaian antara data fisik dengan dokumen konstruksi;
- Pengusulan status aset yang lambat oleh OPD pengguna;
- Proyek mangkrak atau gagal selesai, sehingga tidak bisa diakui sebagai aset tetap;
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi dengan indikator Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi dengan target pada Triwulan II sebesar 25 % dan realisasi sebesar 25 % dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
- Regulasi yang tidak membingungkan dan memiliki penafsiran Tunggal;
- Pemberian penghargaan atau insentif kepada wajib pajak yang patuh.

Faktor Penghambat:

- Banyaknya peraturan perpajakan yang berubah-ubah atau rumit dipahami oleh masyarakat awam;
- Masih banyak wajib pajak, khususnya UMKM dan perorangan, yang kurang memahami hak dan kewajiban perpajakan;
- Akses internet yang terbatas di daerah tertentu menghambat penggunaan sistem online perpajakan
- Sasaran Kinerja Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil Pelaporan Perangkat Daerah terkait dengan target pada Triwulan II sebesar 15 % dan realisasi sebesar 24,18 % dengan capaian 161,2 %.

Faktor Pendukung:

- Adanya peraturan daerah (Perda) dan petunjuk teknis yang lengkap dan operasional mempermudah implementasi pembinaan dan pengawasan;
- Sistem pelaporan digital dan database retribusi yang akurat mempercepat analisis dan pengambilan Keputusan;

- Sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan OPD pemungut retribusi memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan;
- Masyarakat yang memahami kewajiban retribusi dan manfaatnya akan lebih kooperatif dalam pembayaran dan pelaporan.

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya jumlah petugas yang berkompeten menghambat pembinaan dan pengawasan yang menyeluruh;
 - Beberapa OPD pengelola retribusi tidak optimal dalam menyampaikan laporan atau tidak tertib administrasi;
 - Keterbatasan dana untuk kegiatan monitoring, pelatihan, dan pengembangan sistem pengawasan
- Sasaran Kinerja sasaran kinerja Terlaksananya Penyusunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya pegawai yang memahami regulasi, hukum pajak daerah, dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Koordinasi yang baik dengan Bagian Hukum, DPRD, Kementerian/Lembaga terkait, serta perangkat daerah;
- Dukungan dan arahan dari pimpinan untuk mempercepat dan mempermudah proses penyusunan dokumen.

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya jumlah tenaga ahli dalam bidang legislasi atau hukum pajak daerah;
 - Proses harmonisasi, pembahasan, dan persetujuan yang memakan waktu lama;
 - Perubahan regulasi nasional atau kebijakan fiskal yang tiba-tiba dapat memengaruhi substansi dan jadwal penyusunan.
- Sasaran Kinerja Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung:

- Adanya alokasi dana yang memadai untuk kegiatan sosialisasi, termasuk biaya cetak materi, transportasi, narasumber, dan media publikasi;
- Tersedianya petugas pajak daerah yang memahami substansi peraturan dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik;

- Sinergi dengan OPD lain, kecamatan/kelurahan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media local;
- Dukungan dari kepala daerah atau pimpinan instansi dalam bentuk kebijakan atau instruksi.

Faktor Penghambat:

- Anggaran yang terbatas dapat menghambat jangkauan dan frekuensi pelaksanaan sosialisasi;
 - Masyarakat kurang memahami pentingnya pajak daerah sehingga kurang tertarik mengikuti sosialisasi;
 - Adanya perubahan peraturan dalam waktu singkat dapat membingungkan petugas dan masyarakat, serta membutuhkan pembaruan materi secara cepat
- Sasaran Kinerja Meningkatnya pengawasan retribusi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait dengan target pada Triwulan II sebesar 15 % dan realisasi sebesar 22,18 % dengan capaian 147,87%.

Faktor Pendukung:

- Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang jelas mengenai jenis dan tarif retribusi.
- Sinkronisasi kebijakan antar Perangkat Daerah yang mendukung optimalisasi pengawasan.
- Digitalisasi proses pemungutan dan pelaporan retribusi.

Faktor Penghambat:

- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha atau masyarakat terhadap pembayaran retribusi.
 - Kurangnya tenaga pengawas atau petugas pengelola retribusi yang terlatih
 - Terbatasnya frekuensi dan cakupan pengawasan terhadap pemungutan retribusi oleh Perangkat Daerah
- Meningkatnya Pajak Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 1 % dan realisasi sebesar 1,95 % dengan capaian 195%.

Faktor Pendukung:

- Adanya peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur pajak daerah secara jelas dan adil;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi Digitalisasi sistem pemungutan pajak
- Program edukasi, penyuluhan, atau kampanye kesadaran pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Faktor Penghambat:

- Data objek dan subjek pajak yang belum terintegrasi atau tidak valid menyebabkan potensi pajak tidak tergali maksimal;
 - Wilayah pedesaan atau terpencil mungkin belum maksimal menggunakan sistem pembayaran dan pelaporan digital.
- Sasaran Kinerja Terlaksananya Penilaian PBB P2 dengan indikator Jumlah Objek Pajak yang dinilai dengan target pada Triwulan II sebesar 1500 Wajib Pajak dan realisasi sebesar 1712 Wajib Pajak dengan capaian 114%.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan Data Objek Pajak yang Akurat dan Mutakhir;
- Dukungan Teknologi Informasi;
- Koordinasi Antar Instansi

Faktor Penghambat:

- Data objek pajak yang tidak diperbarui atau tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan proses penilaian;
- Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak;
- Ketidaksinergisan antar pihak terkait dapat menyebabkan tumpang tindih atau kelambatan dalam proses penilaian.

TABEL2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Banjar

Kode						Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode (2026)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
									Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	4	5	6		7		8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78		74	%	92	%	124,32	74	166	212,82
5	2	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		100	%		%	100,00	100	100	100,00
5	2	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9		9	Dokumen	9	Dokumen	100	7	16	228,57
5	2	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	1	100,00

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	1	100,00
5	2	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	1	100,00
5	2	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	1	100,00
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3		3	Laporan	3	Laporan	100	3	4	133,33
5	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19		19	Laporan	19	Laporan	100	10	20	166,67
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		100	%		%	100,00	100,00	100	100,00
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12		72	Orang/bulan	72	Orang/bulan	100	63	135	1125,00
5	2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		12	Dokumen	12	Dokumen	100	1	13	108,33
5	2	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2		2	Laporan	2	Laporan	100	0	2	100,00
5	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18		18	Laporan	18	Laporan	100	1	19	105,56
5	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100		100	%		%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	2	1	2.0 3	1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1		12	Dokumen	12	Dokumen	100	0	12	1200,00
5	2	1	2.0 3	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4		50	Laporan	50	Laporan	100	0	50	1250,00
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100	%	100,00	%	100,00	100,00	200	200,00
5	2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12		12	Paket	12	Paket	100	1	13	11,30

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100		12	Paket	12	Paket	100	1	13	13,00
5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0		12	Paket	12	Paket	100	1	13	100,00
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12		12	Paket	12	Paket	0	4	16	100,00
5	2	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	108		0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0,00
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		12	Laporan	12	Laporan	100	1	13	108,33
5	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	%	100,0 0	%	100,00	100,00	200	100
5	2	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	40		20	unit	20	Unit	0	0	20	200,00
5	2	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6		55	unit	55	Unit	100	0	55	916,67
5	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	%	100,0 0	%	100,00	100	200	100
5	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48		48	Laporan	48	Laporan	100	4	52	108,33
5	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13		13	Laporan	13	Laporan	100	1	14	107,69
5	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	%	100,0 0	%	100,00	100	200	100
5	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3		1	Unit	1	Unit	99,9999999 6	0	1	33,33
5	2	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67		57	Unit	57	Unit	100	0	57	85,07

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12		131	Unit	131	Unit	100	0	131	1091,67
5	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2		2	Unit	2	Unit	100	1	3	150,00
5	2	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34		3	Unit	3	Unit	100	0	3	8,82
5	2	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2		2	Unit	2	Unit	100	0	2	100,00
5	2	2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	95,05		87,03	%	85,40	%	98,13		85,4	100
						100		96,29	%	100,00	%	103,85		100	100
						90,73		83,33	%	100,00	%	120,00		100	100
5	2	2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100		100	%		%	100,00	100	100	100
5	2	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	2		2	Dokumen	2	Dokumen	100	0	2	100,00
5	2	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2		2	Dokumen	2	Dokumen	100	0	2	0,00
5	2	2	2.0 1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	2		2	Dokumen	2	Dokumen	100	0	2	0,00
5	2	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3		2	Dokumen	2	Dokumen	100	0	2	66,67
5	2	2	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3		3	Dokumen	3	Dokumen	100	0	3	100,00
5	2	2	2.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3		3	Dokumen	3	Dokumen	100	0	3	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2	2.0 1	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2		2	Dokumen	2	Dokumen	100	0	2	100,00
5	2	2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100		100	%	100,0 0	%	100,00	100	200	100
5	2	2	2.0 2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100		88	Dokumen	88	Dokumen	100	0	88	88,00
5	2	2	2.0 2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100		60	Dokumen	60	Dokumen	100	0	60	60,00
5	2	2	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100		36	Laporan	36	Laporan	100	0	36	36,00
		2	2.0 2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100		47	Dokumen	47	Dokumen	100	0	47	47,00
5	2	2	2.0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100		47	Orang	47	Orang	100	0	47	47,00
5	2	2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100		100	%	100,0 0	%	80,00	100	200	100
5	2	2	2.0 3	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0		12	Dokumen	12	Dokumen	0,00	1	13	0
5	2	2	2.0 3	2	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban	0		0	Dokumen	0	Dokumen	0	94	94	0,00

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2	2.0 3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85		18	Laporan	18	Laporan	100	9	27	31,76
5	2	2	2.0 3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2		2	Laporan	2	Laporan	100	2	4	200,00
5	2	2	2.0 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2		2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	4	200,00
5	2	2	2.0 3	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1		1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	1	100,00
5	2	2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100		100	%		%	100,00	100	100	100
5	2	2	2.0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100		12	Laporan	12	Laporan	100	50	62	62,00
5	2	2	2.0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100		100	%		%	100,00	100	100	100
5	2	2	2.0 5	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	54		54	Dokumen	54	Dokumen	100	26	80	148,15
5	2	3			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	96,50		93,2 5	%	100,0 0	%	107,24		100	100,00
5	2	3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	96,50		93,2 5	%	100	%	107,24	100	200	100
5	2	3	2.0 1	1	Penyusunan Standar Harga	0		1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	2	100,00
5	2	3	2.0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	0		1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	2	100,00

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	0		3	Laporan	3	Laporan	100	1	4	100,00
5	2	3	2.0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	0		1	Laporan	1	Laporan	100	1	2	100,00
5	2	3	2.0 1	8	Penilaian Barang Milik daerah	0		4	Laporan	4	Laporan	100	1	5	100,00
5	2	3	2.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0		25	Dokumen	25	Dokumen	100	8	33	100,00
5	2	3	2.0 1	1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0		1	Laporan	1	Laporan	100	1	2	100,00
5	2	4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100		94	%	93,00	%	98,94		93,00	93,00
5	2	4	2,0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100		94	%	93	%	98,94		93	93
5	2	4	2,0 1	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2		2	Dokumen	2,00	Dokumen	100,00	0	2	100,00
5	2	4	2,0 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2		2	Dokumen	2	Dokumen	100	0	2	100,00
5	2	4	2,0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8		8	Laporan	8	Laporan	100	2	10	125,00
5	2	4	2,0 1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	1		0	Unit	0	Unit	0	0	0	0,00
5	2	4	2,0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10		11	Laporan	18	Laporan	164	3	21	210,00
5	2	4	2,0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4		4	Laporan	4	Laporan	100	2	6	150,00
5	2	4	2,0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8300		8300	Obyek Pajak	8811	Obyek Pajak	106	4150	12961	156,16
5	2	4	2,0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3		3	Dokumen	3	Dokumen	100	0	3	100,00

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	4	2,0 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11		3168	Layanan	3168	Layanan	100	7	3175	28863,6 4
5	2	4	2,0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	11		16	dokumen	16	dokumen	100	8	24	218,18
5	2	4	2,0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	11		11	dokumen	11	dokumen	100	6	17	154,55
5	2	4	2,0 1	1 2	Penyelesaian Keberatan pajak daerah	11		120	dokumen	120	dokumen	100	0	120	1090,91
5	2	4	2,0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3		160	dokumen	160	dokumen	100	0	160	5333,33
5	2	4	2,0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	11		4	laporan	4	Laporan	100	2	6	54,55

Catatan : Table 2.1 sesuaikan matrik antara target Renstra, Target renja dan realisasinya

Sumber : Laporan LKJIP BPKPAD 2022

2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Hasil evaluasi capaian kinerja BPKPAD melalui 3 (tiga) sasaran indikator kinerja pada tahun 2026 yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, yaitu :

- (1) Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan yang direncanakan target 1 tahun sebesar 5 % untuk Target Triwulan II sebesar 1 % dengan realisasi 3,59% dan capaian 359 %
- (2) Persentase Peningkatan Retribusi Daerah target 1 tahun sebesar 5 % untuk Target Triwulan II sebesar 1% dengan realisasi 0.89 dan capaian 89%
- (3) Opini BPK dengan target WTP
- (4) Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan target nilai 81.30
- (5) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 75 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut ;

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 2	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5	1	%	3,59	359	Kepala Badan
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5	1	%	0,89	89	Kepala Badan
2	Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	WTP	100	Predikat	100	100	Kepala Badan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,30	-	Nilai	-	Belum ada penilaian	Kepala Badan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	60	%	88,3	147,17	Kepala Badan

Untuk mencapai target sasaran strategis dan sasaran kinerja banyak dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bisa disajikan sebagai berikut persasaran strategis/kinerja.

- 1. Dalam Mencapai target Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:
Faktor Pendukung:
 - Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
 - Dukungan dari pimpinan Daerah Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta koordinasi yang baik dengan Inspektorat serta seluruh Perangkat Daerah.

- Regulasi baik Perda maupun Perbup sebagai dasar pelaksanaan sudah selesai
- Dukungan untuk pelaksanaan sampai dengan ketersediaan Aplikasi dapat disediakan

Faktor Penghambat:

- Kesadaran Wajib pajak akan pentingnya dampak pajak dan retribusi
- Mengingat Luas daerah sebagai cakupan wajib pajak dan retribusi perlu updating Wajib Pajak
- Adanya Diskon Pembayaran Listrik
- Adanya MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tidak Kena Pajak BPHTB
- Salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan adalah Hotel Aston yang mengalami peralihan kepemilikan sehingga kontribusi pajaknya juga terhambat.

2. Dalam mencapai target Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retibusi Daerah Terhadap PAD dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Adanya pembayaran retribusi IMTA (Tenaga Kerja Asing) sudah mencapai target
- Regulasi baik Perda maupun Perbup sebagai dasar pelaksanaan sudah selesai
- Dukungan untuk pelaksanaan sampai dengan ketersediaan Aplikasi dapat disediakan.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi.
- Terlambatnya perangkat daerah melaporkan realisasi retribusi
- Terkadang terjadi tumpang tindih kebijakan atau kurangnya sinkronisasi antar unit kerja

3. Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel dengan Indikator Opini BPK terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- Dukungan dari pimpinan Daerah Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta koordinasi yang baik dengan Inspektorat serta seluruh Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat:

- Laporan Keuangan atau hasil audit dari BUMD yang diserahkan tidak serempak

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025 / 2026	2026 / 2027	2027 / 2028	2028 / 2029	2025 / 2026	2026 / 2027	2026 / 2027	2027 / 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Pajak Dan Retribusi Daerah											
	Persentase Peningkatan Pajak Daerah			5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah			5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2	Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel											
	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan											
	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81.30	81.60	81.90	82.10	A	A	A	A	A
	IKM			75	75	76	76	77	77	78	78	80

Sumber : Dokumen Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026 dan LKJiP BPKPAD 2022

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKPAD Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2026**

	Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Banjar
1	2
1.	Belum optimal Keterkaitan perencanaan dan penganggaran
2.	Belum optimal pengelolaan barang milik daerah
3.	Belum optimal nya realisasi anggaran daerah
4.	Laporan keuangan belum memenuhi SAP
5	Belum intensifikasi pemungutan pajak daerah
6	Belum Ekstensifikasi pemungutan pajak daerah

Tabel 2.5 Isu Strategis

No	Isu Strategis
1.	Penganggran dari historical budgeting menjadi money follow program /fuction yang berbasis kinerja dan prioritas pembangunan daerah
2.	Peningkatan manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan . penganggaran. pelaksanaan. pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
3.	Peraturan yang ada seringkali tidak sinkron dengan kondisi lapangan dan perkembangan teknologi
4.	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani Pengelolaan BMD
5.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah
6	Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti. PBB P2 dan perijinan investasi
7.	Peningkatan penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8.	Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2026-2029 adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan”*** serta misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religious, berakhlak dan berbudaya.
- b) Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan.
- c) Memperkuat tata Kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
- d) Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan birokrasi yang professional, bersih dan melayani.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKPAD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

Faktor-faktor penghambat pelayanan BPKPAD :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar terlaksana diakhir tahun anggaran.
2. Masih rendahnya Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tatakelola barang milik daerah.
3. Belum terwujudnya keharmonisan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing perangkat daerah/unit kerja.
4. Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.
5. Perangkat Daerah/unit kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tatakelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.

7. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
8. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.

Faktor-faktor pendukung pelayanan BPKPAD :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar (*Stakeholder*) untuk menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara professional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan teknologi informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.
5. Adanya kerjasama/pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan dan aset daerah.
6. Penggunaan aplikasi berbasis online.

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 Kabupaten Banjar

Sumber : Dokumen RKPD Kabupaten Banjar TA. 2026 dan input data SIPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar

				RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN (SESUAI KAK)						CAT ATA N		
Kode				Urusan/Bidang/Progr am/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokas i	Sasaran/Kine rja	Indikator Kinerja/Sasaran	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu	Urusan/Bidang/Progr am/Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Sasaran/Kine rja	Indikator Kinerja/Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Renja 2026	Pagu 2025	Pagu 2026					Renja 2026	Pagu 2026	
										307,669,842,667						307,669,842,667	
						Meningkatny a Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5%		236,980,935,500			Meningkatny a Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5%	236,980,935,500	
							Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5%		1,263,316,700				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5%	1,263,316,700	
						Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	100%		1,393,951,700			Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	100%	1,393,951,700	
						Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,30%		34,015,819,384			Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,30%	34,015,819,384	
							IKM	80%		34,015,819,384				IKM	75%	34,015,819,384	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.B anjar	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80%	68,229,784,955	68,031,638,767	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.B anjar	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80%	68,031,638,767	
5	02	01	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	92,852,500	109,632,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	109,632,500	
							Persentase Dokumen SPIP Sesuai Ketentuan	100%				Kab.B anjar		Persentase Dokumen SPIP Sesuai Ketentuan	100%		
5	02	01	02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20,000,000	15,999,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.B anjar	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	15,999,800	
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,266,800	20,517,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,517,000	
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,676,200	17,852,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,852,600	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,630,500	10,980,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,980,500	
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,312,200	10,662,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,662,200	
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20,543,300	11,768,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	11,768,400	
5	02	01	02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	13,423,500	14,298,200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	14,298,200	
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Terlaksannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4,404,000	4,578,800	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.B anjar	Terlaksannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4,578,800	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	2,800,000	2,975,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	2,975,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	01	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	61,490,537,461	62,540,532,207	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Banjar	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	62,540,532,207	
5	02	01	02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	60,681,554,661	61,731,550,007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Banjar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	61,731,550,007	
5	02	01	02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	770,491,200	770,490,800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Banjar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	770,490,800	
5	02	01	02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	22,065,800	22,065,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Banjar	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	22,065,800	
5	02	01	02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	16,425,800	16,425,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Banjar	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	16,425,600	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Terlaksananya a Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	100%	44,794,300	44,793,500	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya a Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	100%	44,793,500	
5	02	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8,425,400	8,425,200	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8,425,200	
5	02	01	03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14,520,200	14,520,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.B anjar	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14,520,000	
5	02	01	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21,848,700	21,848,300	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.B anjar	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21,848,300	
5	2	1	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	100%	251,435,500	209,069,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	100%	209,069,500	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	151,435,500	109,069,500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.B anjar	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	109,069,500	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10 Orang	100,000,000	100,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.B anjar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10 Orang	100,000,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	1,566,748,800	1,412,513,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya a Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	1,412,513,300	
							Persentase Laporan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	75%				Kab.B anjar		Persentase Laporan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
5	2	1	02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28,629,500	28,625,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.B anjar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28,625,000	
5	2	1	02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	59,847,500	60,045,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.B anjar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60,045,500	
5	2	1	02.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	104,047,000	64,100,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.B anjar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,100,000	
5	2	1	02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	88,126,800	88,126,800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.B anjar	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	88,126,800	
5	2	1	02.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,286,098,000	1,171,616,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.B anjar	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,171,616,000	
5	2	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya a Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	100%	1,272,676,000	470,018,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya a Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	100%	470,018,000	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau		Tersedianya Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab.B anjar	Tersedianya Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

				Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	528,745,000	342,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.B anjar	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	342,000,000	
5	2	1	02.07	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 Unit	99,652,000	0	Pengadaan Mebel	Kab.B anjar	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 Unit	0	
5	2	1	02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	71 Unit	1,173,024,000	128,018,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.B anjar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	71 Unit	128,018,000	
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	100%	2,050,148,394	1,969,372,760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	100%	1,969,372,760	
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	376,823,394	381,852,760	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.B anjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	381,852,760	
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,673,325,000	1,587,520,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.B anjar	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,587,520,000	
5	2	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	1	1,460,592,000	1,275,707,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	1	1,275,707,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,990,000	38,990,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.B anjar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,990,000	
5	2	1	02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	620,860,000	724,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.B anjar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	724,000,000	
5	2	1	02.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	106,170,000	113,562,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.B anjar	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	113,562,000	
5	2	1	02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	579,513,000	299,475,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.B anjar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	299,475,000	
5	2	1	02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	625 Unit	115,059,000	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.B anjar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	625 Unit	50,000,000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72 Unit	49,680,000	49,680,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.B anjar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72 Unit	49,680,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase penerapan Perda APBD	92.58%	246,478,611,700	236,006,095,000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.B anjar	Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD	Persentase penerapan Perda APBD	100%	236,006,095,000	
						Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100.00%				Kab.B anjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100.00%		
						Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100.00%				Kab.B anjar	Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100.00%		
						Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah	Indeks Penyerapan Belanja Daerah	15				Kab.B anjar	Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah	Indeks Penyerapan Belanja Daerah	15		
						Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	5.086				Kab.B anjar	Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	5.086		
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Indeks Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	100%	1,574,705,000	1,409,949,800	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab.B anjar			100%	1,409,949,800	
						Meningkatnya Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD	Indeks Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD	100%				Kab.B anjar			100%		
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	53,700,000	33,700,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.B anjar	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	33,700,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	43,650,000	23,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab.B anjar	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	23,650,000	
5	2	2	02.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	107,534,500	107,534,500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab.B anjar	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	107,534,500	
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	892,859,200	833,259,200	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.B anjar	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	833,259,200	
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	80,620,000	60,620,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.B anjar	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	60,620,000	
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	57,740,000	42,584,800	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.B anjar	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	42,584,800	
5	2	2	02.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	338,601,300	308,601,300	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	308,601,300	
5	2	2	02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	100%	223,888,209,000	223,770,796,400	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab.B anjar	Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	100%	223,770,796,400	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

						Meningkatny a Kualitas Penatausaha an Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase Laporan Pertanggungjaw aban Penata usaha an Perangkat daerah Yang Berkualitas	100%				Kab.B anjar	Meningkatny a Kualitas Penatausaha an Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Perangkat daerah Yang Berkualitas	100%		
						Meningkatny a Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100%				Kab.B anjar	Meningkatny a Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100%		
						Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100%				Kab.B anjar	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100%		
						Tersalurnya Belanja Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	100%				Kab.B anjar	Tersalurnya Belanja Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	100%		
5	2	2	02. 02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	88 Dokume n	46,395,500	48,395,500	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Kab.B anjar	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	88 Dokume n	48,395,500	
5	2	2	02. 02	Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokume n	222,933,227,500	222,933,627, 500	Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab.B anjar	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokume n	222,933,627,50 0	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2	02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	43,561,500	43,561,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab.B anjar	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	43,561,500	
5	2	2	02.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47 Dokumen	104,299,500	104,303,500	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab.B anjar	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47 Dokumen	104,303,500	
5	2	2	02.02	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	760,725,000	640,908,400	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.B anjar	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	640,908,400	
5	02	02	02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	863,466,500	673,117,600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab.B anjar	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	673,117,600	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

						Perangkat daerah						Perangkat daerah					
						Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%				Kab.B anjar	Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%		
						Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	100%				Kab.B anjar	Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	100%		
						Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	100%				Kab.B anjar	Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	100%		
						Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	100%				Kab.B anjar	Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	100%		
5	02	02	02.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	21,834,000	20,742,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	20,742,000	
5	02	02	02.03	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	32,708,000	35,506,500	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban	Kab.B anjar	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	35,506,500	
5	02	02	02.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	18 Laporan	35,828,000	38,463,500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab.B anjar	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	38,463,500	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

						Triwulanan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran					Triwulanan dan Semesteran				
5	02	02	02.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	154,244,000	80,514,200	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	80,514,200
5	02	02	02.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	49,393,000	61,828,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Kab.B anjar	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	61,828,000
5	02	02	02.03	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Tersedianya Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0	0	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab.B anjar	Tersedianya Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	02	02.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	19,790,000	11,174,600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	11,174,600	
5	02	02	02.03	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100,000,000	46,551,800	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab.B anjar	Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	46,551,800	
5	02	02	02.03	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	72,914,000	53,636,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	53,636,000	
5	02	02	02.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	
5	02	02	02.03	Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	310 Orang	220,745,500	173,786,000	Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.B anjar	Terlaksananya Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	310 Orang	173,786,000	
5	02	02	02.03	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	27 Lembaga	37,290,000	44,868,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab.B anjar	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	27 Lembaga	44,868,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	02	02.03	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Laporan	118,720,000	106,047,000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Laporan	106,047,000	
5	02	02	02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah		Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100	20,000,000,000	10,000,000,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	Kab.B anjar	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100	10,000,000,000	
5	02	02	02.04	Pengelolaan dana darurat dan mendesak		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	20 Laporan	20,000,000,000	10,000,000,000	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab.B anjar	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	20 Laporan	10,000,000,000	
5	02	02	02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah		Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100	152,231,200	152,231,200	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab.B anjar	Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100	152,231,200	
5	02	02	02.05	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3,734	152,231,200	152,231,200	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3,734	152,231,200	
5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indek Pengelolaan Aset	93	#REF!	974,840,500	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.B anjar	Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Indek Pengelolaan Aset	93	974,840,500	
				Pengelolaan Barang Milik daerah		Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	100%		974,840,500	Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab.B anjar	Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	100%	974,840,500	
						Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	100%				Kab.B anjar	Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	100%		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

						Terealisasi a penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Persentasi realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	100%				Kab.B anjar	Terealisasi a penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Persentasi realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	100%		
						Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	100%				Kab.B anjar	Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	100%		
						Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	100%				Kab.B anjar	Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	100%		
						Tersusunnya laporan Semester I dan II Penataushaa n BMD	Persentase penyampaian Laporan BMD Semester I dan II BMD tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%				Kab.B anjar	Tersusunnya laporan Semester I dan II Penataushaa n BMD	Persentase penyampaian Laporan BMD Semester I dan II BMD tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		
						tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian	persentase penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian yang tepat waktu	100%				Kab.B anjar	tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian	persentase penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian yang tepat waktu	100%		
						Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	90%				Kab.B anjar	Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	90%		
						Terealisasi a Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtangan an, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan	persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtangan an, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	70%				Kab.B anjar	Terealisasi a Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtangan an, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan	persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	70%		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							penghapusan BMD						penghapusan BMD				
							Terealisasi a Tindak lanjut BMD Rusak Berat	persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat	70%				Kab.B anjar	Terealisasi a Tindak lanjut BMD Rusak Berat	persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat	70%	
							Terealisasi a Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	100%				Kab.B anjar	Terealisasi a Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	100%	
							Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah	70%				Kab.B anjar	Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah	70%	
							Tersedianya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	70%				Kab.B anjar	Tersedianya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	70%	
5	02	03	02.01	Penyusunan Standar Harga		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	1 Dokumen	394,485,500	36,285,500	Penyusunan Standar Harga	Kab.B anjar	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	1 Dokumen	36,285,500	
5	02	03	02.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	81,712,000	12,132,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	12,132,000	
5	02	03	02.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	17,491,000	72,272,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	72,272,000	
5	02	03	02.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	33,810,000	41,570,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	41,570,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	0	0	02.01	Penatausahaan Barang Milik daerah		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	304,942,000	279,649,000	Penatausahaan Barang Milik daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	279,649,000	
5	0	0	02.01	Inventarisasi Barang Milik		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	17,160,000	26,910,000	Inventarisasi Barang Milik	Kab.B anjar	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	26,910,000	
5	0	0	02.01	Pengamanan barang Milik daerah		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	161,229,500	165,279,000	Pengamanan barang Milik daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	165,279,000	
5	0	0	02.01	Penilaian Barang Milik daerah		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	48,900,000	9,380,000	Penilaian Barang Milik daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	9,380,000	
5	0	0	02.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	0	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	
5	0	0	02.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	24,907,000	29,202,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	29,202,000	
5	0	0	02.01	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	122,276,000	172,866,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	172,866,000	
5	0	0	02.01	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	0	0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.B anjar	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	0	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	03	02.01	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94 Orang	77,389,000	129,295,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.B anjar	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94 Orang	129,295,000	
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD	44.00 %	4,608,420,300	2,657,268,400	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab.B anjar	Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD	44.00 %	2,657,268,400	
5	02	04	02.01			Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	6%	4,608,420,300			Kab.B anjar	Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	6%		
				Pengelolaan Pendapatan Daerah		Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	5%	4,608,420,300	2,657,268,400	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah	100%	2,657,268,400	
						Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti	100%				Kab.B anjar	Terlaksananya penyusunan dokumen peraturan perundangan pajak daerah	Persentase penyusunan dokumen peraturan daerah dan kebijakan pajak daerah	100%		
						Meningkatnya Pembinaan Retribusi	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dari Hasil Pelaporan Perangkat daerah	100%				Kab.B anjar	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan pajak daerah	Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan pajak daerah	100%		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

						Meningkatnya Pengawasan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dari Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Terkait	100%				Kab.B anjar	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%		
												Kab.B anjar	Meningkatnya potensi wajib pajak daerah yang terdata	Persentase potensi wajib pajak daerah (9 jenis) yang terdata	100%		
												Kab.B anjar	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%		
												Kab.B anjar	Terlaksananya penilaian PBB P2	Persentase objek pajak yang dinilai	100%		
												Kab.B anjar	Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah	Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah	100%		
												Kab.B anjar	Meningkatnya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang ditindaklanjuti	100%		
												Kab.B anjar	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi	Persentase Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

												Data Pelaporan Pajak Daerah					
											Kab.B anjar	Meningkatnya realisasi penagihan wajib pajak daerah	Persentase realisasi penagihan wajib pajak daerah	100%			
											Kab.B anjar	Meningkatnya penyelesaian kebertan pajak daerah	Persentase keberatan pajak daerah yang di tindaklanjuti	100%			
											Kab.B anjar	Terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah	Persentase wajib pajak yang diperiksa	100%			
											Kab.B anjar	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah Yang Terlaksana	100%			
5	02	04	02.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	16,648,000	16,648,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	16,648,000	
5	02	04	02.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	37,308,000	37,308,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	37,308,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	0	0	02.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	317,332,000	131,162,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	131,162,000	
5	0	0	02.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	233,026,000	40,320,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	40,320,000	
5	0	0	02.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	2,750,229,900	965,395,500	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	965,395,500	
5	0	0	02.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	33,907,000	17,277,500	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	17,277,500	
5	0	0	02.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8,300	64,978,500	72,689,500	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab.B anjar	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8,300	72,689,500	
5	0	0	02.	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	59,789,000	67,210,500	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	67,210,500	
5	0	0	02.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	121,259,400	158,021,200	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab.B anjar	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	158,021,200	
5	0	0	02.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	55,326,500	46,603,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	46,603,000	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	0	0	02.	Penagihan Pajak Daerah		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	688,593,000	845,491,200	Penagihan Pajak Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	845,491,200	
5	0	0	02.	Penyelesaian Keberatan pajak daerah		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	16,329,000	22,249,000	Penyelesaian Keberatan pajak daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	22,249,000	
5	0	0	02.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Terlaksananya a Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	189,583,000	212,782,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab.B anjar	Terlaksananya a Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	212,782,000	
5	0	0	02.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	24,111,000	24,111,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	Kab.B anjar	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	24,111,000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab 2.5 ini menjelaskan terkait hasil kajian program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM dan lainnya. Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar tidak terdapat usulan program kegiatan baik dari kelompok masyarakat atau Lembaga lainnya.

Karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan ketugasan BPKPAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan telaah atas kebijakan nasional tahun 2025 – 2029. Tema RPJMN Tahun 2025 – 2029 : **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ”**.

Dalam 8 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang terdiri Asta cita 1 yaitu :

Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Asta Cita 2 yaitu :

Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,energi,air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Asta cita 3 yaitu :

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengemabangkan agromarium industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Asta cita 4 yaitu:

Memperkuat pembangunan sumberdaya (SDM), sains, teknologi, Pendidikan,Kesehatan,prestasi olahraga,kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan ,pemuda(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Asta Cita 5 yaitu :

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta cita 6 yaitu:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Asta cita 7 yaitu:

Memperkuat reformasi politik, hukum,dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.

Asta cita 8 yaitu:

Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peneingkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Guna untuk menudukung agenda pembangunan nasional yang terdiri dari 8 Asta Cita,

Visi dan Misai RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045, Visi yaitu : Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistic Kalimantan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan menuju Babussalam. **Misi Kalimantan Selatan yaitu ada 8 (delapan):**

- Misi 1. : Mewujudkan transformasi sosial ;
SP1 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia
- Misi 2. : Mewujudkan transformasi ekonomi;
SP2: Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
- Misi 3. : Mewujudkan transformasi tata Kelola ;
SP4: Meningkatnya tata Kelola pemerintahan daerah dan pelayanan public yang berbasis digital.
- Misi 4. : Mewujudkan keamanan daerah yang
Tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
SP6: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum serta kehidupan berdemokrasi
- Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan Ekologi
SP7: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan
- Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
SP3: Meningkatnya pemerataan pembangunan
- Misi 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
SP8 : Meningkatnya mutu layanan sarana dan prasarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah terutama untuk mendukung ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
- MISI 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan
SP5 : Meningkatnya Kinerja pembangunan

Guna mendukung agenda pembangunan nasional ke- 7 (tujuh), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan 6 (enam) prioritas pembangunan, BPKPAD berkontribusi pada prioritas ke-4 Provinsi Kalimantan Selatan yaitu prioritas **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik”**.

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan Kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju ditahun 2025 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045

Dengan memperhatikan tema RPJMN Tahun 2026 – 2029, prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. BPKPAD Kabupaten Banjar sesuai tugas dan fungsinya berperan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Banjar yang **Kedua yaitu Memenapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis**

pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan dan keempat, yaitu **“Memperkuat tata Kelola pemerintah dan birokrasi yang professional, bersih dan melayani.”**

Maka untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, BPKPAD Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
2. Mengoptimalkan pengendalian anggaran
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
4. Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
5. Meningkatkan pengelolaan dana transfer
6. Meningkatkan kualitas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Meningkatkan Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi asset
9. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
10. Optimalisasi aset dan pengelolaan barang persediaan
11. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui sosialisasi dan uji petik
13. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
14. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada
15. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib PDRD sampai ketingkat desa/kelurahan
16. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan

3.1.2 Telaahan Terhadap Prioritas Pembangunan (Provinsi)

Dalam 17 (tujuh belas) prioritas nasional, BPKPAD berkontribusi pada agenda ke-3 (ke- tiga) yaitu **“Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi”**. Dan pada agenda ke-14 yaitu **“ Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM memlalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota Inovatif karektarikistik-mandiri lainnya,** Guna mendukung agenda prioritas nasional ke- 3 (tiga) dan ke 14 (empat belas), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan 15 (lima belas) prioritas provinsi, BPKPAD berkontribusi pada prioritas ke-7 (tujuh) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu prioritas **“Implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dan manajemen kepegawaian berbasis system merit dengan pemanfaatan teknologi informasi”**. Dan pada prioritas ke Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi syarat wajib bagi lancarnya roda pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, maka strategi ini menjadi poin penting dalam pembangunan Kabupaten Banjar Penguatan tata Kelola pemerintahan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas.

3.1.3. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Dengan memperhatikan tema RPJMN Tahun 2020 – 2024, prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. BPKPAD Kabupaten Banjar sesuai tugas dan fungsinya berperan dalam prioritas Kabupaten Banjar yang keempat, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Melalui Reformasi dan Penyederhanaan Birokrasi.”**

Maka untuk mengimplementasikan prioritas yang telah ditetapkan, BPKPAD Kabupaten Banjar melaksanakan program sebagai berikut :

Program	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja/Sasaran	Target 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD	Persentase penerapan Perda APBD	92.58%
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30%
	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100.00%
	Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100.00%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indek Pengelolaan Aset	93
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	11
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5%
	Meningkatnya Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5%

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPAD

Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2025 - 2029 Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium Development Gold (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang memiliki 3 (tiga) sasaran, sasaran pertama (1) Meningkatnya Kontribusi pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD, sasaran kedua (2) Tata Kelola keuangan daerah yang akuntabel, ssasaran ketiga (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini tujuan merupakan suatu hal yang akan diupayakan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari visi misi Kabupaten Banjar dan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013.

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah :

- **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indicator **Rasio PAD terhadap PDRB (%)** sasaran yang inigin dicapai adalah **Meningkatnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadpap PADA** dengan indikator sasaran 1. Persentase Peningkatan pajak daerah, 2. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah
- **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indicator **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah **Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel** dengan indikator sasaran Opini BPK
- **Meningkatnya Akuntabilitas Konerja Pemerintah Daerah** dengan sasaran yang ingin dicapai **Nilai sakis**, dengan sasaran yang ingin di capai **Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi kabupaten** dengan Indikator **Nilai Sakip Perangkat Daerah**
- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan Indikator **Indeks pelayanan public (IPP)** dengan sasaran yang ingin dicapai **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** dengan indicator **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2025 maka dalam penyusunan Renja BPKPAD 2025 mengacu dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029, sesuai dengan urusan penunjang pemerintah bidang keuangan daerah yang ditangani oleh BPKPAD ikut mendukung terwujudnya sasaran daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPAD 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2026
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Rasio PAD terhadap PDRB	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Pesentase Peningkatan Pajak daerah	5%
				Persentase peningkatan Retribusi Daerah	5%
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Tata Kelola keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Konerja Pemerintah Daerah dan kualitas Pelayanan Pbulik	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keualitas Pelayanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A
				IKM	75%

Sumber : Dokumen Renstra BPKPAD

3.3. Program dan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan. Kemudian adanya pemutakhiran PMDN 90 Tahun 2019 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 4 (Empat) program

prioritas dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 97 (Sembilan puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- d. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- e. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- j. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- k. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- d. *Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.*
 - a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- e. *Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*
 - 'a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1) *Pengelolaan Barang Milik Daerah*

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- k. Penagihan Pajak Daerah;
- l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
- n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

4. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari Jumlah seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD ditahun 2026 adalah sebanyak 4 (Empat) program prioritas dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 85 (Delapan Puluh Lima) sub kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 307,669,842,667,- (Tiga Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program prioritas dan kegiatan renja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)																				
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. BANJAR																				
TAHUN 2026																				
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RE NJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RE NJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah							307.669.842.667,00						349.340.557.317,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							307.669.842.667,00						349.340.557.317,00	
	5	0	2			KEUANGAN							307.669.842.667,00						349.340.557.317,00	
1	5	0	0	1		PROGR AM PENUNJ ANG URUSA	Nilai IKKI Perangkat Daerah	-			80 %	68.031.638.767,00						-	70.539.356.407,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

RENCANA KERJA 2025 DAERAH KABUPATEN																				
						N PEMERI NTAHAN DAERA H KABUPA TEN/KO TA														
	5	0	0	2.		Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan Persentase Dokumen SPIP Sesuai Ketentuan	-			100 % 100 %	109.632. 500,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba	-	-	137.094. 650,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															udupa n.	sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		2	1	0	0		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Doku men	15.999.8 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		23.100.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

																judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		2	1	0	0																
				1	0																
					3																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Doku men	17.852.6 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-			19.636.3 20,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		2	1	0	0															
				1	0															
					4															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Doku men	10.980.5 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		12.078.5 50,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

																judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l					
	5	0 2	0 1	2. 0 1	0 0 0 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Doku men	4.578.80 0,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-			5.036.90 0,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	-			100 % 100 %	62.540.5 32.207,0 0			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	61.571.4 35.521,0 0	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															udupa n.	Digita l				
	5	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		2	1	0	0		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Oran g/bul an	61.731.5 50.007,0 0	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD), DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		60.681.5 54.661,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	-	-			-	44.793.5 00,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	49.273.6 20,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															udupa n.	Digita l				
	5	0	0	2.	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
		2	1	0	0															
				3	0															
					1															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Doku men	8.425.20 0,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		9.268.05 0,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Adminis trasi Kepegaw aian Perangk at Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	-			100 %	209.069. 500,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	229.976. 450,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															udupa n.	Digita l				
	5	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		2	1	0	0		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Doku men	109.069. 500,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		119.976. 450,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l					
	5	0 2	0 1	2. 0 5	0 0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Oran g	100.000. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		110.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase Laporan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	-			100 % 7575 %	1.412.51 3.300,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	2.052.03 3.830,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															udupa n.	Digita l				
	5	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		2	1	0	0		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	28.625.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		31.488.0 50,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		2	1	0	0		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.045.5 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		66.050.0 50,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l					
	5	0 2	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	64.100.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		112.632. 850,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	470.018. 000,00			-	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	2.490.30 5.500,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															Digital				
	5	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		2	1	0	0														
				7	0														
					2														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	342.000. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab	-		342.000. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

																oratif Berba sis Digita l				
	5	0 2	0 1	2. 0 7	0 0 0 5	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				95 Unit	0,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab	-		499.708. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

																oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		2	1	0 7	0 1 0		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				71 Unit	128.018. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif	-		1.648.59 7.500,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

																Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	-			100 %	1.969.37 2.760,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	2.166.31 0.036,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															Digital				
	502	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	381.852.760,00	Kab. Banjar, Martapura, Keraton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan	-		420.038.036,00	BADAN PENGELOLAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.		Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	-			100 %	1.275.70 7.000,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	-	-	1.842.92 6.800,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		2	1	0	0		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	724.000. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	05. Penin gkata n Tata Kelola Pemer intah an Yang Fokus Pada Pelay anan Publi k 7. Tata Kelola yang Akunt abel dan	-		796.400. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														judi, dan penyel- udupa- n.	Kolab- oratif Berba- sis Digita- l				
	502090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir- ehabilitasi				625 Unit	50.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Keraton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik , hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.	Kolab oratif Berba sis Digita l				
2	5	0	0			PROGR AM PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAERA H	Persentase Penerapan Perda APBDPersenta se Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKDPersentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	-			100 %11 %40 %	236.006. 095.000, 00						-	269.153. 986.520, 00	
	5	0	0	2.		Koordin asi dan Penyusu nan Rencana Anggara n Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan anggaran sesuai Peraturan Perundang- Undangan Persentase Penganggaran	-			100 % 100 %	1.409.94 9.800,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba	SKP D Kab upat en Banj ar	-	1.732.17 5.400,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Daerah sesuai jadwal								serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	sis Digita l				
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
		2	2	0	0		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Doku men	33.700.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis	SKP D Kab upat en Banj ar		59.070.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	Digita l					DAER AH
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
		2	2	0 1	0 0 2		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Doku men	23.650.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		48.015.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.						
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
		2	2	0	0															
				1	0															
					7															
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Doku men	833.259. 200,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		982.145. 120,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.						
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
		2	2	0	0		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Doku men	60.620.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		88.682.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.					
	5	0 2	0 2	2. 0 1	0 0 0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Doku men	42.584.8 00,00	Kab. Banj ar, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		63.514.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.						
	5	0	0	2.		Koordin asi dan Pengelol aan Perbend aharaan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungja wan Perangkat Daerah yang Berkualitas Persentase Penatausahaa n Belanja Pegawai Persentase Penyaluran Belanja Daerah Persentase Penyerapan APBD Persentase penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat waktu	-			100 % 100 % 100 % 100 %	223.770. 796.400, 00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar	-	246.279. 674.300, 00		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.						
	5	0	0	2.	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
		2	2	0	0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				60 Doku men	222.933. 627.500, 00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		245.226. 990.250, 00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														ba, judi, dan penyel udupa n.					
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)													
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi				36 Lapor an	43.561.5 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		47.917.6 50,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)								judi, dan penyeludupan.					
	5	0	0	2.	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
		2	2	0	0															
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan				47 Dokumen	104.303.500,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuasi reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaborasi Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		114.733.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Instansi Terkait								dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.					
	5	0	0	2.	0	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
		2	2	0	0		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta				47 Oran g	640.908. 400,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		836.797. 500,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.					
	5	0	0	2.		Koordin asi dan Pelaksa naan Akuntan si dan Pelapora n Keuanga n Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi pendapatan Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan Persentase Pertanggungja	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	673.117. 600,00		Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar	-	974.682. 500,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							waban Pelaksanaan APBD								judi, dan penyel udupa n.					
	5	0 2	0 2	2. 0 3	0 0 0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Lapor an	20.742.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		25.300.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.					
	5	0	0	2.	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													
		2	2	0	0					2	35.506.5	Kab.	DANA	Memp	7.	SKP		37.400.0	BADA
				3	0	Jumlah				Doku	00,00	Banj	ALOK	erkuat	Tata	D	00,00	N	
				2	2	Dokumen				men		ar,	ASI	reform	Kelola	Kab		PENG	
						Hasil						Mart	UMU	asi	yang	upat		ELOLA	
						Rekonsiliasi						apur	M	politik	Akunt	en		AN	
						dan Verifikasi						a,	(DAU)	, huku	abel	Banj		KEUA	
						Aset,						Kera		m dan	dan	ar		NGAN,	
						Kewajiban,						ton		m dan	Kolab			PEND	
						Ekuitas,								birokr	oratif			APATA	
						Pendapatan,								asi,	Berba			N DAN	
						Belanja,								serta	sis			ASET	
						Pembiayaan,								memp	Digita			DAER	
						Pendapatan-								erkuat	l			AH	
						LO, dan Beban								ahan					
														dan					
														pembe					
														rantas					
														an					
														korup					
														si,					
														narko					

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														judi, dan penyel- udupa- n.					
	5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta				2 Doku men	61.828.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		56.100.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASSET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

													judi, dan penyel- udupa- n.							
	5	0	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
		2	2	0	0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Kerugian Daerah			1	11.174.6	Kab. Banj ar,	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		17.930.0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASSET DAER AH	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														judi, dan penyel- udupa- n.						
	5	0	0	2.	0	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														
		2	2	0	0	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
				3	1		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/Ko ta				310 Oran g	173.786. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		251.900. 000,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASSET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

[illegible]

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.						
	5	0	0	2.		Penunja ng Urusan Kewena ngan Pengelol aan Keuanga n Daerah	Persentase Laporan Pertanggungja waban Perangkat Daerah Yang Berkualitas	-			100 %	10.000.0 00.000,0 0			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar	-	20.000.0 00.000,0 0		

															udupa n.					
	5	0 2	0 2	2. 0 4	0 0 0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20 Lapor an	10.000.0 00.000,0 0	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		20.000.0 00.000,0 0	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.						
	5	0	0	2.		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	-			100 %	152.231.200,00			Mempertuak reformasi politik , hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyel	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar	-	167.454.320,00		

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

														udupa n.					
	5	0 2	0 2	2. 0 5	0 0 0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				3734 Doku men	152.231. 200,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba,	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		167.454. 320,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

															judi, dan penyel udupa n.					
3	5	0 2	0 3			PROGR AM PENGEL OLAAN BARAN G MILIK DAERA H	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Indeks Pengelolaan Aset	-			11,56 % 90 %	974.840. 500,00						-	1.967.98 5.800,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

	5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD Terkait BMD	-			100 %	974.840.500,00			Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar	-	1.967.985.800,00	
		2	3	01			Persentase Materialitas temuan BPK atas LKPD Terkait BMD				100 %									
							Persentase Nilai Perolehan Tanah Yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan				70 %									
							Persentase Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah Yang Patuh Terhadap Perundang-undangan				100 %									
							Persentase Penggunaan Barang Yang Menyerahkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian				85 %									
											70 %									
											100 %									

							Tepat Waktu Persentase Penyampaian Laporan Semester I dan II Perangkat Daerah Tepat Waktu Persentase Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD Persentase Sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah Persentase Tindaklanjut BMD Kontruksi Dalam Pengerjaan Persentase Tindaklanjut BMD Rusak Berat Persentase Tindak lanjut Keseluruhan Rekomendasi												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Hasil temuan BPK terkait BMD Persentase Tindaklanjut Pemanfaatan, pemindahtang an, pemusnahan, Pengalihan Status Penggunaan dan Penghapusan BMD Persentase Waktu Penetapan Rencana Kubutuhan BMD (RKBMD)														
	5	0	0	2.	0	Penyusunan Standar Harga															
		2	3	0	0																
				1	0																
					1																

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	12.132.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		90.345.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.001	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	72.272.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		79.499.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
		2	3	0	0															
				1	0															
					4															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	41.570.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Keraton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		45.727.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
		2	3	0	0															
				1	0															
					5															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah				6 Lapor an	279.649. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		425.519. 600,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH	
	5	0 2	0 3	2. 0 1	0 0 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah					2 Lapor an	26.910.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		29.601.0 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH
	5	0 2	0 3	2. 0 1	0 0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					2 Lapor an	165.279. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		262.382. 450,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH
	5	0 2	0 3	2. 0 1	0 0 8	Penilaian Barang Milik Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

RENCANA KERJA 2020 BPKP AD KAB. BANJAR						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	9.380.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		230.318.000,00	BADAN PENGELOLAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
		2	3	0	0														
				1	1														
					0														

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					25 Dokumen	29.202.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		32.122.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
		2	3	0	0																
				1	1																
					1																

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					4 Lapor an	172.866. 000,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	SKP D Kab upat en Banj ar		190.152. 600,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH
	5	0 2	0 3	2. 0 1	0 0 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				94 Orang	129.295.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Keraton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	SKPD Kabupaten Banjar		142.224.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4	5	0	0				PROGR AM PENGEL OLAAN PENDAP ATAN	Persentase Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	-			5 %	2.657.268.400,00					-	7.679.228.590,00	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

						DAERAH														
	5	0	0	2.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase Kanal Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD Persentase Wajib Pajak Daerah yang terlayani	-			100 % 100 % 100 % 100 %	2.657.26 8.400,00			Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	Waji b Paja k Kab upat en Banj ar	-	7.679.22 8.590,00	
	5	0	0	2.	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
		2	4	0	0															
				1	0															
					1															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	16.648.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		18.312.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
		2	4	0	0															
				1	0															
					2															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	37.308.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		41.038.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
		2	4	0	0															
				1	0															
					3															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	131.162.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		199.465.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
		2	4	0	0															
				1	0															
					4															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	40.320.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		291.414.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		5002	04	201	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					12 Lapor an	965.395. 500,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	Waji b Paja k Kab upat en Banj ar		5.136.18 4.350,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH
	5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

RENCANA KERJA 2020 BPKAD KAB. BANJAR						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	17.277.500,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		34.669.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
		2	4	0	0	1	0	7											

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					8300 Obyek Pajak	72.689.500,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		126.900.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					
	5	0	0	2.	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah																0	0	1	0	8

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Doku men	67.210.5 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	Waji b Paja k Kab upat en Banj ar		126.900. 400,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH		
	5	0	0	2.	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																0 0 1 0 9

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					11 Layan an	158.021.200,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	Waji b Paja k Kab upat en Banj ar		217.871.940,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH				
	5	0	0	2.	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																0	0	1	0

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				11 Doku men	46.603.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kerton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	Waji b Paja k Kab upat en Banj ar		52.302.800,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH	
	5	02	04	2.0011	0011	Penagihan Pajak Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5 Dokumen	845.491.200,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		1.149.111.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	0	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
		2	4	0	0															
				1	1															
					2															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					4 Dokumen	22.249.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaborasi Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		24.473.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		5002	04	2.001	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	212.782.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Kertanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Wajib Pajak Kabupaten Banjar		234.060.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	04	201	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Lapor an	24.111.0 00,00	Kab. Banj ar, Mart apur a, Kera ton	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	7. Tata Kelola yang Akunt abel dan Kolab oratif Berba sis Digita l	Waji b Paja k Kab upat en Banj ar		26.522.1 00,00	BADA N PENG ELOLA AN KEUA NGAN, PEND APATA N DAN ASET DAER AH
	J U M L A H											307.669. 842.667, 00						349.340. 557.317, 00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2026 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pengelolaan Keuangan, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) di tahun 2026 adalah sebanyak 4 program prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 7 kegiatan dan 65 subkegiatan. Serta 1 program penunjang dan rutin dengan 8 kegiatan dan 32 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. **307.669.842.667 (Tiga Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah. Rumusan program dan kegiatan berikut diharapkan dapat menjelaskan dukungan dan kesungguhan BPKPAD dalam melaksanakan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD sebagaimana tabel berikut :

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja/Sasaran	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target 2026	Pagu	Sumber Dana		Renja 2026	Pagu 2027
									307,669,842,667				311,401,171,800
					Meningkatnya Kemnadirian Fiskal	Persentase Peningkatan Pajak Daerah		5%	236,980,935,500			5%	236,980,935,500
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah		5%	1,263,316,700			5%	1,263,316,700
					Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK		100%	1,393,951,700			100%	1,393,951,700
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah		80%	34,015,819,384			80%	34,015,819,384
						IKM		80%	34,015,819,384			80%	34,015,819,384
5	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kab.Banjar	80%	68,031,638,767	APBD		80%	71,427,739,080
5	02	01	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar	100%	109,632,500	APBD		100%	109,632,500
						Persentase Dokumen SPIP Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
5	02	01	02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Banjar	9 Dokumen	15,999,800	APBD		9 Dokumen	16,799,790
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Banjar	1 Dokumen	20,517,000	APBD		1 Dokumen	21,542,850
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Banjar	1 Dokumen	17,852,600	APBD		1 Dokumen	18,745,230
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Banjar	1 Dokumen	10,980,500	APBD		1 Dokumen	11,529,525

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Banjar	1 Dokumen	10,662,200	APBD	1 Dokumen	11,195,310
5	02	01	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjar	3 Laporan	11,768,400	APBD	3 Laporan	12,356,820
5	02	01	02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjar	19 Laporan	14,298,200	APBD	19 Laporan	15,013,110
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	4,578,800	APBD	1 Dokumen	4,807,740
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Banjar	1 Data	2,975,000	APBD	1 Data	3,123,750
5	02	01	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	<i>Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan</i>	Kab.Banjar	100%	62,540,532,207	APBD	100%	65,667,558,817
5	02	01	02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Banjar	78 Orang/Bulan	61,731,550,007	APBD	78 Orang/Bulan	64,818,127,507
5	02	01	02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Banjar	12 Dokumen	770,490,800	APBD	12 Dokumen	809,015,340
5	02	01	02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Banjar	2 Laporan	22,065,800	APBD	2 Laporan	23,169,090

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	01	02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Banjar	18 Laporan	16,425,600	APBD		18 Laporan	17,246,880
5	02	01	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar	100%	44,793,500	APBD		100%	47,033,175
5	02	01	02.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Banjar	2 Dokumen	8,425,200	APBD		2 Dokumen	8,846,460
5	02	01	02.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Banjar	4 Laporan	14,520,000	APBD		4 Laporan	15,246,000
5	02	01	02.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Banjar	2 Laporan	21,848,300	APBD		2 Laporan	22,940,715
5	2	1	02.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	Kab.Banjar	100%	209,069,500	APBD		100%	219,522,975
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Banjar	12 Dokumen	109,069,500	APBD		12 Dokumen	114,522,975
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kab.Banjar	10 Orang	100,000,000	APBD		10 Orang	105,000,000
5	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100%	1,412,513,300	APBD		100%	1,483,138,965
						Persentase Laporan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Kab.Banjar	75%		APBD			
5	2	1	02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	12 Paket	28,625,000	APBD		12 Paket	30,056,250
5	2	1	02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	12 Paket	60,045,500	APBD		12 Paket	63,047,775

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	02.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	12 Paket	64,100,000	APBD		12 Paket	67,305,000
5	2	1	02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Banjar	12 Paket	88,126,800	APBD		12 Paket	92,533,140
5	2	1	02.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Banjar	12 Laporan	1,171,616,000	APBD		12 Laporan	1,230,196,800
5	2	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	Kab.Banjar	100%	470,018,000	APBD		100%	493,518,900
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Banjar	1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Banjar	1 Unit	342,000,000	APBD		1 Unit	359,100,000
5	2	1	02.07	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Banjar	95 Unit	0	APBD		95 Unit	0
5	2	1	02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Banjar	71 Unit	128,018,000	APBD		71 Unit	134,418,900
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	Kab.Banjar	100%	1,969,372,760	APBD		100%	2,067,841,398
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Banjar	48 Laporan	381,852,760	APBD		48 Laporan	400,945,398
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	13 Laporan	1,587,520,000	APBD		13 Laporan	1,666,896,000
5	2	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	Kab.Banjar	1	1,275,707,000	APBD		1	1,339,492,350
5	2	1	02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab.Banjar	1 Unit	38,990,000	APBD		1 Unit	40,939,500

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	1	02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Banjar	57 Unit	724,000,000	APBD	57 Unit	760,200,000
5	2	1	02.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Banjar	144 Unit	113,562,000	APBD	144 Unit	119,240,100
5	2	1	02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	3 Unit	299,475,000	APBD	3 Unit	314,448,750
5	2	1	02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab.Banjar	625 Unit	50,000,000	APBD	625 Unit	52,500,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Banjar	72 Unit	49,680,000	APBD	72 Unit	52,164,000
5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD	Persentase penerapan Perda APBD	Kab.Banjar	92.58%	236,006,095,000	APBD	100%	236,159,718,375
						Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD				APBD	11%	
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				APBD	4000%	
					Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Kab.Banjar	100.00%		APBD	100.00%	
					Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Kab.Banjar	100.00%		APBD	100.00%	
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Penganggaran daerah Sesuai jadwal	Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah Sesuai Jadwal	Kab.Banjar	100%	1,409,949,800	APBD	100%	1,480,447,290
					Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab.Banjar	2 Dokumen	33,700,000	APBD	2 Dokumen	35,385,000

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab.Banjar	2 Dokumen	23,650,000	APBD	2 Dokumen	24,832,500
5	2	2	02.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab.Banjar	2 Dokumen	107,534,500	APBD	2 Dokumen	112,911,225
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Banjar	2 Dokumen	833,259,200	APBD	2 Dokumen	874,922,160
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Banjar	2 Dokumen	60,620,000	APBD	2 Dokumen	63,651,000
5	2	2	02.01	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.Banjar	3 Dokumen	42,584,800	APBD	3 Dokumen	44,714,040
5	2	2	02.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab.Banjar	2 Dokumen	308,601,300	APBD	2 Dokumen	324,031,365
5	2	2	02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	Kab.Banjar	100%	223,770,796,400	APBD	100%	223,812,654,845
					Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Perangkat daerah Yang Berkualitas	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
					Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
					Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
					Tersalurnya Belanja Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
5	2	2	02.02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab.Banjar	88 Dokumen	48,395,500	APBD	88 Dokumen	50,815,275
5	2	2	02.02	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab.Banjar	60 Dokumen	222,933,627,500	APBD	60 Dokumen	222,933,627,500

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	2	2	02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab.Banjar	36 Laporan	43,561,500	APBD	36 Laporan	45,739,575
5	2	2	02.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab.Banjar	47 Dokumen	104,303,500	APBD	47 Dokumen	109,518,675
5	2	2	02.02	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Banjar	47 Orang	640,908,400	APBD	47 Orang	672,953,820
5	02	02	02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan Perangkat daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Banjar	100%	673,117,600	APBD	100%	706,773,480
					Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
					Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
					Tercapainya Pelaksanaan Akutansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akutansi Pendapatan	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
					Tercapainya Pelaksanaan Akutansi Belanja dan pembiayaan	Persentase Capaian Peaksanaan Akutansi Belanja dan Pembiayaan	Kab.Banjar	100%		APBD	100%	
5	02	02	02.03	Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab.Banjar	12 Laporan	20,742,000	APBD	12 Laporan	21,779,100

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	02	02.03	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab.Banjar	2 Dokumen	35,506,500	APBD	2 Dokumen	37,281,825
5	02	02	02.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab.Banjar	18 Laporan	38,463,500	APBD	18 Laporan	40,386,675
5	02	02	02.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab.Banjar	2 Laporan	80,514,200	APBD	2 Laporan	84,539,910
5	02	02	02.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab.Banjar	2 Dokumen	61,828,000	APBD	2 Dokumen	64,919,400
5	02	02	02.03	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	Kab.Banjar	1 Dokumen	0	APBD	1 Dokumen	0
5	02	02	02.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	11,174,600	APBD	1 Dokumen	11,733,330
5	02	02	02.03	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab.Banjar	1 Dokumen	46,551,800	APBD	1 Dokumen	48,879,390
5	02	02	02.03	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	53,636,000	APBD	1 Dokumen	56,317,800
5	02	02	02.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	0	APBD	1 Dokumen	0

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	02	02.03	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Banjar	310 Orang	173,786,000	APBD		310 Orang	182,475,300
5	02	02	02.03	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	Kab.Banjar	27 Lembaga	44,868,000	APBD		27 Lembaga	47,111,400
5	02	02	02.03	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab.Banjar	1 Laporan	106,047,000	APBD		1 Laporan	111,349,350
5	02	02	02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	Kab.Banjar	100	10,000,000,000	APBD		100	10,000,000,000
5	02	02	02.04	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab.Banjar	20 Laporan	10,000,000,000	APBD		20 Laporan	10,000,000,000
5	02	02	02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	Kab.Banjar	100	152,231,200	APBD		100	159,842,760
5	02	02	02.05	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab.Banjar	3,734	152,231,200	APBD		3,734	159,842,760
5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indek Pengelolaan Aset	Kab.Banjar	93	974,840,500	APBD		93	1,023,582,525
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		0		APBD			
				Pengelolaan Barang Milik daerah	Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Kab.Banjar	100%	974,840,500	APBD		100%	1,023,582,525
					Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Persentase realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

					Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD	Persentase penyampaian Laporan BMD Semester I dan II BMD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian	persentase penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian yang tepat waktu	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Kab.Banjar	90%		APBD		90%	
					Terealisasinya Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	persentase Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	Kab.Banjar	70%		APBD		70%	
					Terealisasinya Tindak lanjut BMD Rusak Berat	persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat	Kab.Banjar	70%		APBD		70%	
					Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah	Kab.Banjar	70%		APBD		70%	
					Tersedianya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	Kab.Banjar	70%		APBD		70%	
5	02	03	02.01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Kab.Banjar	1 Dokumen	36,285,500	APBD		1 Dokumen	38,099,775
5	02	03	02.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	12,132,000	APBD		1 Dokumen	12,738,600
5	02	03	02.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	72,272,000	APBD		1 Dokumen	75,885,600
5	02	03	02.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	1 Dokumen	41,570,000	APBD		1 Dokumen	43,648,500
5	02	03	02.01	Penatausahaan Barang Milik daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	6 Laporan	279,649,000	APBD		6 Laporan	293,631,450
5	02	03	02.01	Inventarisasi Barang Milik	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	2 Laporan	26,910,000	APBD		2 Laporan	28,255,500
5	02	03	02.01	Pengamanan barang Milik daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	2 Laporan	165,279,000	APBD		2 Laporan	173,542,950

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	03	02.01	Penilaian Barang Milik daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	1 Laporan	9,380,000	APBD		1 Laporan	9,849,000
5	02	03	02.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	0 Laporan	0	APBD		0 Laporan	0
5	02	03	02.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	25 Dokumen	29,202,000	APBD		25 Dokumen	30,662,100
5	02	03	02.01	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Banjar	4 Laporan	172,866,000	APBD		4 Laporan	181,509,300
5	02	03	02.01	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab.Banjar	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	0
5	02	03	02.01	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Banjar	94 Orang	129,295,000	APBD		94 Orang	135,759,750
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Kab.Banjar	5%	2,657,268,400	APBD		5%	2,790,131,820
5	02	04	02.01		Meningkatnya Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Kab.Banjar	5%		APBD		5%	
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Kab.Banjar	5%	2,657,268,400	APBD		100%	2,790,131,820
					Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Meningkatnya Pembinaan Retribusi	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dari Hasil Pelaporan Perangkat daerah	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
					Meningkatnya Pengawasan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dari Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Terkait	Kab.Banjar	100%		APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

							Kab.Banjar			APBD		100%	
							Kab.Banjar			APBD		100%	
5	02	04	02.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab.Banjar	2	16,648,000	APBD		2	17,480,400
5	02	04	02.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Banjar	2	37,308,000	APBD		2	39,173,400
5	02	04	02.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Banjar	4	131,162,000	APBD		4	137,720,100
5	02	04	02.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab.Banjar	1	40,320,000	APBD		1	42,336,000
5	02	04	02.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab.Banjar	12	965,395,500	APBD		12	1,013,665,275
5	02	04	02.01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab.Banjar	4	17,277,500	APBD		4	18,141,375
5	02	04	02.01	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab.Banjar	8,300	72,689,500	APBD		8,300	76,323,975
5	02	04	02.01	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab.Banjar	3	67,210,500	APBD		3	70,571,025
5	02	04	02.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab.Banjar	11	158,021,200	APBD		11	165,922,260
5	02	04	02.01	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab.Banjar	11	46,603,000	APBD		11	48,933,150
5	02	04	02.01	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab.Banjar	5	845,491,200	APBD		5	887,765,760
5	02	04	02.01	Penyelesaian Keberatan pajak daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab.Banjar	4	22,249,000	APBD		4	23,361,450
5	02	04	02.01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab.Banjar	4	212,782,000	APBD		4	223,421,100

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

5	02	04	02.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Banjar	4	24,111,000	APBD	4	25,316,550
---	----	----	-------	--	---	--	------------	---	------------	------	---	------------

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2026

Renja BPKPAD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra BPKPAD dan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2026. Renja BPKPAD menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja BPKPAD tahun 2026.

Renja BPKPAD tahun 2025 ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) BPKPAD Kabupaten Banjar tahun 2026 untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra BPKPAD 2025- 2029 dan RPJMD Kabupaten Banjar 2025- 2029 pada tahun 2025 ini.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra BPKPAD dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat sasaran. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan BPKPAD Kabupaten Banjar untuk untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *imporoving* (memperbaiki) kinerja.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap sub kegiatan adalah langkah untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Hasil evaluasi yang didapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan salah satu hal berharga untuk lebih mengarahkan pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra BPKPAD Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renja ini harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi internal, optimalisasi sumber daya, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan seperti SIPD dan Simondalev menjadi aspek penting dalam memastikan pencapaian kinerja. Kaidah pelaksanaan juga menekankan pentingnya kesesuaian antara nomenklatur,

indikator kinerja, dan penggunaan anggaran yang diarahkan sesuai dengan perubahan struktur RPJMD dan Renstra.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai kelanjutan dari dokumen ini, Bappedalitbang akan memastikan bahwa seluruh isi perubahan Renja diselaraskan dengan perubahan RKPD serta diinternalisasi dalam DPA-SKPD. Rencana tindak lanjut mencakup peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan aplikasi perencanaan, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi fungsi walidata pembangunan daerah. Selain itu, asistensi teknis terhadap SKPD mitra akan terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas dokumen dan ketepatan perencanaan program dan kegiatan. Peran aktif seluruh unit kerja dan mitra perencanaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renja secara akurat, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

4.4 Analisis Risiko Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar mengidentifikasi sejumlah risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Risiko-risiko tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Meskipun seiring berjalannya waktu, besar kemungkinan akan ditemukan risiko-risiko strategis baru sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi, kondisi sosial kultural masyarakat, budaya dan faktor-faktor lainnya.

Berikut adalah uraian terhadap risiko – risiko strategis dimaksud:

1. Penentuan pagu anggaran belum mencerminkan money follow function Analisis risiko sebagai berikut :
 - Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Fungsi
 - Klasifikasi Program Prioritas Daerah
 - Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
 - Peningkatan Kapasitas TAPD dan SKPD
 - Monitoring dan Evaluasi Alokasi Pagu Berdasarkan Kinerja
 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Mitigasi terhadap ketidaksesuaian pagu dengan prinsip Money Follow Function harus menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan penganggaran berbasis fungsi dan kinerja, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja, tetapi juga menjamin capaian pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

2. Peningkatan manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan . penganggaran. Pelaksanaan. Pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan. Analisis risiko sebagai berikut :
 - Data Perencanaan Tidak Akurat atau Tidak Terkini

- Penganggaran Tidak Berdasarkan Informasi Kinerja dan Output
- Kesenjangan Informasi dalam Pengendalian dan Monitoring
- Evaluasi Kinerja Tidak Didukung oleh Data yang Valid dan Terintegrasi
- Keamanan dan Keterpaduan Sistem Informasi Lemah

Peningkatan manajemen data dan informasi bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga membangun sistem yang terintegrasi, aman, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Dengan mitigasi risiko yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi berbasis bukti dan terarah untuk hasil yang maksimal.

3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan OPD. Analisis Risiko sebagai berikut :
- Pelatihan akuntansi berbasis akrual secara berkelanjutan
 - Penjadwalan dan pembagian tugas yang jelas
 - Penerapan SOP dan checklist laporan keuangan
 - Sistem knowledge management dan kaderisasi staf
 - Pelatihan aplikasi keuangan (SIMD, SIPD dsb)

4. Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Identifikasi Risiko adalah Risiko administrasi (data tidak akurat, pencatatan ganda, dll), Risiko hukum (status kepemilikan tidak jelas, sengketa aset), Risiko operasional (pemeliharaan tidak memadai, kehilangan/kerusakan barang), Risiko keuangan (aset tidak menghasilkan manfaat ekonomis) dan Risiko reputasi (temuan BPK, sorotan publik/media).

Penilaian Risiko. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko, Menyusun rencana aksi mitigasi, Penertiban aset melalui inventarisasi ulang, Digitalisasi manajemen BMD, Peningkatan kompetensi SDM pengelola aset dan Penguatan pengawasan dan audit internal. Pemantauan dan Evaluasi Monitoring berkala terhadap efektivitas mitigasi dan Penyesuaian kebijakan atau SOP sesuai dinamika di lapangan.

5. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti. PBB P2 dan perijinan investasi

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Objek: Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan untuk usaha Pertumbuhan perumahan & apartemen, Pusat perbelanjaan dan kawasan industri, Lahan idle yang berpotensi dioptimalkan nilai jual objek pajaknya (NJOP), Sumber daya potensial Pemetaan NJOP yang belum diperbarui, Pengembang besar yang memiliki banyak lahan belum dimanfaatkan dan Properti tidak terdaftar yang belum dikenai pajak.

Strategi mitigasi risiko

1. Untuk PBB-P2

RENCANA KERJA 2026 BPKPAD KAB. BANJAR

- Digitalisasi dan pemutakhiran basis data aset (gunakan GIS, drone, atau fotogrametri).
- Pemutakhiran NJOP secara berkala berdasarkan nilai pasar aktual.
- Audit properti besar (real estate audit) bekerja sama dengan BPN dan developer.
- Sinkronisasi data antar dinas (BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, Dinas PU).
- Kampanye pemecahan PBB oleh developer saat rumah diserahterimakan.

2. Untuk Perizinan Investasi

- Penguatan sistem perizinan online (OSS, SIMBG) untuk transparansi dan akuntabilitas.
- One-door investment service yang mengintegrasikan pengawasan dan pendataan properti baru.
- Reward untuk investor taat pajak (misalnya melalui pemrosesan cepat izin)
- Audit kepatuhan izin dan retribusi secara periodik
- Sosialisasi dan asistensi pengembang kecil agar patuh izin dan pajak.

6. Peningkatan penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Identifikasi Objek Potensial Inventarisasi objek bernilai tinggi secara sistematis
Gunakan data dari: BPHTB (nilai transaksi jual beli), Dinas Perizinan (izin lokasi, IMB, SLF), Kantor Pertanahan (sertifikat HGB, SHM) dan Laporan investasi DPMPTSP
2. Penilaian Berbasis Pasar
Terapkan metode perbandingan data pasar dan/atau pendapatan (income approach) khususnya untuk properti komersial Gunakan teknologi GIS dan sistem informasi geospasial (Peta Blok PBB)
3. Integrasi Pajak dengan Perizinan dan Investasi Jadikan data penilaian PBB sebagai basis penilaian retribusi dan izin pemanfaatan ruang Tautkan data NJOP dengan Penilaian Nilai Lahan untuk izin pemanfaatan dan Rencana pengembangan kawasan industri atau perumahan
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Audit penilaian dan pengenaan PBB secara sampling, Penegakan hukum atas manipulasi data atau penghindaran pajak dan Sanksi administrasi untuk keterlambatan pelaporan nilai transaksi

7. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

1. Registrasi Objek/Subjek Pajak

Input melalui aplikasi online (SmartGov dan SI Intan Dara atau mobile app)

2. Penetapan dan Penagihan

Otomatisasi SKPD dan STPD berdasarkan data sistem dan Notifikasi digital via email, SMS, atau aplikasi

3. Pembayaran

Terhubung ke kanal pembayaran resmi: QRIS, e-wallet, bank mitra, dan Referensi tagihan dengan kode bayar unik

4. Validasi dan Penerimaan

Validasi real-time melalui Smartgov ke sistem bank dan Updating sistem penerimaan daerah otomatis

5. Pelaporan dan Monitoring

Dashboard online untuk pemantauan PAD harian dan Laporan agregat untuk manajemen dan akuntabilitas

Demikian Renja BPKPAD Kabupaten Banjar tahun 2026 ini disusun, untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di BPKPAD Kabupaten Banjar.

Martapura, 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar,

Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si

NIP. 19660104 198602 1 004

LAMPIRAN

SK Penetapan Renja BPKPAD 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 1 Martapura Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4721358 Faximile (0511) 4721027

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENJA 2024

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Renja Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
- KEDUA : Renja Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 01 Mei 2023



KEPALA BADAN

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 1 Martapura Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4721358 Faximile (0511) 4721027

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Banjar,



Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP.119660104 198602 1 004

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan, Pendapatan Aset
Daerah Kabupaten
Banjar
NOMOR : 19 Tahun 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2023

- 1. **Pengarah**, yaitu :
 - a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024;
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Kerja (RENJA) 2024;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 kepada Kepala BPKPAD melalui Sekretaris BPKPAD Kabupaten Banjar.

- 2. **Penanggung Jawab**, yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

- 3. **Ketua**, yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- 4. **Anggota**, yaitu :
 - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA), tahun lalu;
 - b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan, Pendapatan Aset
Daerah Kabupaten
Banjar
NOMOR : 19 Tahun 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENJA (RENJA) 2024
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Pengarah
2.	Sekretaris	Penanggungjawab
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Ketua
4.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Penyusun Laporan dan Evaluasi	Kesekretariatan

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 3 Januari 2023

Kcpala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar,



Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Perdana Utama Muda/ IV/c
NIP. 19660104 198602 1 004



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara perencanaan pada Perangkat Daerah tahun 2026 dengan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan satu tahun yang merupakan komitmen Perangkat Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD tahun 2026.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan:

- a. RKPD Tahun 2026; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 6

Setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan rencana program yang telah termuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan pada Perangkat Daerah dan Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2025

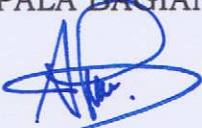
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001